LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU
(LKj-IP) TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau tahun pertama dalam masa RPJMD Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana analisa dan evaluasi agar kinerja ke depan dapat tercapai dengan baik, efektif, efesien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannnya dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kabupaten Berau Tahun 2023, khususnya Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Redeb, Maret 2024

BUPATI BERAU,

Hj. SRI JUMARTH MAS, M.Pd

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai konsekuensi logis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (Good Governance) yang berorientasikan pada kepentingan masyarakat luas, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabel serta mempunyai wawasan jauh kedepan, pengukuran kinerja instansi pemerintah mutlak diperlukan guna mengetahui tingkat capaian yang diperoleh dari misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pencapaian Kinerja yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai parameter penilaian, adalah merupakan gambaran tingkat keberhasilan/ kegagalan dari misi organisasi. Sehingga hasil yang diperoleh tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. **Misi Pertama;** yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (indikator) indikator kinerja dengan capaiaan presentase rata-rata sebesar 128,71 persen yang telah dicapai dalam tahun 2023. Dengan capaian kinerja memperoleh nilai/predikat sangat baik.
2. **Misi Kedua;** yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal dengan menetapkan 2 (dua) Tujuan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023. Dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik. Dengan nilai capaian presentase rata-rata adalah 93,29 persen.
3. **Misi Ketiga ;** yaitu Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan telah ditetapkan 2 (dua) tujuan

3 (tiga) sasaran startegis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian presentase rata-rata adalah 184,30 persen.

4. **Misi Keempat ;** yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran startegis dan 4 (empat) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian presentase rata-rata adalah 96,7 persen. Akan tetapi ada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang di inginkan dengan capaian rata – rata 100%, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Berau.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran dengan 25 (dua puluh enam) indikator sasaran dan mengacu pada 4 (empat) misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2023. Dari uraian diatas maka capaian sasaran dalam visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 6 indikator kinerja.
- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja.
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- 13 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	%	14,29	13,36	93,49	Baik
		2	Rata-rata lama sekolah	%	9,84	9,56	97,15	Baik
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	%	72,38	73,45	101,48	Baik Sekali
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	44,90	100	222,72	Baik Sekali
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	persen	4,73	4,95	95,34	Baik
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	persen	5,01	5,54	89,42	Baik
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	persen	3,00	1,04	34,66	Kurang
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,99	1,38	139,39	Baik Sekali
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	11,26	94,94	Baik
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	86,9	105,98	Baik Sekali
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67	67,05	100,07	Baik Sekali
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,20	79,84	712,86	Baik Sekali
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	persen	86	81,70	95	Baik
		14	Persentase irigasi kabupaten	persen	21	73,61	350,52	Baik Sekali

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	%	14,29	13,36	93,49	Baik
		2	Rata-rata lama sekolah	%	9,84	9,56	97,15	Baik
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	%	72,38	73,45	101,48	Baik Sekali
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	44,90	100	222,72	Baik Sekali
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	persen	4,73	4,95	95,34	Baik
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	persen	5,01	5,54	89,42	Baik
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	persen	3,00	1,04	34,66	Kurang
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,99	1,38	139,39	Baik Sekali
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	11,26	94,94	Baik
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	86,9	105,98	Baik Sekali
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67	67,05	100,07	Baik Sekali
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,20	79,84	712,86	Baik Sekali
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	persen	86	81,70	95	Baik
		14	Persentase irigasi kabupaten	persen	21	73,61	350,52	Baik Sekali

			dalam kondisi baik					
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,69	99,99	100,30	Baik
		16	Rasio rumah layak huni	persen	0,197	0,2000	101,52	Baik Sekali
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,6	0,75	125	Baik Sekali
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,02	144,29	Baik Sekali
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	56,49	53,55	94,41	Baik
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks		85,17	98,84	Baik
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	86,17	93,76	104,41	Baik Sekali
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	89,799	WTP*	100*	Baik
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	WTP		93,13	Baik
		24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	67	62,40	93,74	Baik
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori /Nilai	Tinggi	3,1964 (sedang)	93,74 (sedang)	Baik
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA							**139,54**	**Baik Sekali**

Rata-rata capaian kinerja adalah 139,54% dalam kriteria penilaian **"Baik Sekali"**, namun dari hasil pengukuran kinerja masih terdapat beberapa kekurangan yang ditunjukkan dengan capaian kinerja di bawah seratus persen. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk menjadi perhatian guna upaya perbaikan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Gambaran Umum Sejarah Kab.Berau 2
1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kab.Berau 4
1.5 Keragaman SDM Pemerintah Kab.Berau 8
1.6 Gambaran Umum Kondisi Kab.Berau 12
a.Aspek Geografi 12
b. Demografis 14
1.7 Pertumbuhan Ekonomi 15
1.8 Alur Pikir Penyajian 18
BAB II PERENCANAAN KERJA 19
2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kab.Berau 19
2.1.1 Visi 20
2.1.2 Misi 23
2.1.3 Tujuan dan Sasaran 26
2.1.4 Strategi 32
2.1.5 Program Pembangunan Daerah 38
2.1.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 51
2.1.7 Rencana Kinerja Tahunan 53
2.1.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 57

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 61

A. Akuntabilitas Kinerja 61

B. Realisasi Anggaran 143

BAB IV PENUTUP 154

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transpran, akuntabel, efektif dan efesien, pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik. Dalam upaya perbaikan peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melibatkan seluruh pihak baik pihak Pemerintah Daerah itu sendiri, pihak swasta, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak

masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Berau 2021-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini adalah sebagai pertanggungjawaban seluruh Perangkat Daerah khususnya bagi organisasi yang mempunyai target daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan pemerintah di Kabupaten Berau dan sarana dalam upaya evaluasi pengingkatan kinerja yang lebih baik, dimana dalam Laporan Kinerja harus memberikan gambaran dalam melakukan identifikasi keberhasilan dan kendala tidak tercapainya suatu tujuan serta memberikan upaya solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di organisasi tersebut. Hal ini merupakan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

1.3. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Menurut sejarah Raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Surya Natakesuma dan isterinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahan kerjaan pada awalnya berkedudukan di Sungai Lati.

Aji Raden Suryanata Kesuma menjalankan masa pemerintahan tahun 1400-1432 pada masa itu berhasil menyatukan wilayah pemukiman masyarakat Berau yang disebut Banua, yaitu Banua Merancang, Banua Pantai, Banua Kuran, Banua Rantau Buyut dan Banua Rantau Sewakung.

Setelah beliau wafat, pemerintahan Kesultanan Berau dilanjutkan oleh putranya dan selanjutnya secara turun temurun memerintah sampai abad ke 17. Kemudian awal abad ke 18 penjajah Belanda memasuki kerajaan Berau dengan berkedok sebagai pedagang. Namun kegiatan itu dilakukan politik *De Vide Et Impera* (politik adu dompa). Sehingga kerajaan terpecah menjadi 2 Kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur.

Pada saat bersamaan masuk ajaran agama islam ke Berau yang dibawa oleh imam Sambuayan dengan pusat penyebaran di sekitar Sukan. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar Alimuddin (1800-1852). Raja Alam terkenal pimpinan yang gigih menentang penjajah belanda.Sedangkan kesultanan Gunung Tabur sebagai sultan pertamanya adalah Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800-1833), keturunnya meneruskan pemerintahan hingga kepada sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin (wafat 15 April 1951) dan Sultan terakhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub (1951-1960). Kemudian wilayah kesultanan tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Berau.

Sultan Muhammad Aminuddin menjadi Kepala Daerah Istimewa Berau, Beliau memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istemewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu Undang-undang Darurat tahun 1953 Tanggal terbitnya Undang-undang tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 1959, Daerah Istemewa Berau berubah menjadi Kabupaten Dati II Berau dan Tanjung Redeb seabgai Ibukotanya, dengan Sultan Aji Raden Muhammad Ayub (1960-1964) menjadi Bupati Kepala Daerah Tk.II Verau yang pertama.

Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau. Dimana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan pusat pemerintahnnya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September

tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu kemudian diabadikan sebagai hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 3 tanggal 2 April 1992.

1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri atas :
    1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan dan penataan ruang;
    4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum);
    6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah daratan);
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,bidang statistik dan bidang persandian;
16. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
21. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

e. Badan Daerah Terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana;

f. Kecamatan terdiri atas :

1. Kecamatan Batu Putih dengan Tipe A;
2. Kecamatan Biatan dengan Tipe A;
3. Kecamatan Biduk-Biduk dengan Tipe A;
4. Kecamatan Gunung Tabur dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelay dengan Tipe A;
6. Kecamatan Maratua dengan Tipe A;
7. Kecamatan Pulau Derawan dengan Tipe A;
8. Kecamatan Sambaliung dengan Tipe A;
9. Kecamatan Segah dengan Tipe A;
10. Kecamatan Tabalar dengan Tipe A;
11. Kecamatan Talisayan dengan Tipe A;
12. Kecamatan Tanjung Redeb dengan Tipe A;
13. Kecamatan Teluk Bayur dengan Tipe A.
14. Kecamatan Teluk Bayur dengan Tipe A;

g. Kelurahan terdiri dari :

1.Kelurahan Tanjung Redeb

2.Kelurahan Gunung Tabur

3.Kelurahan Sambaliung

4.Kelurahan Teluk Bayur

5.Kelurahan Gayam

6.Kelurahan Rinding

7.Kelurahan Gunung Panjang

8.Kelurahan Bedungun

9.Kelurahan Karang Ambun

10.Kelurahan Bugis

1.5 Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memiliki SDM yang cukup beragam, jumlah Aparatur Sipil Negara se Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 4.716 sedangkan tahun 2022 sebanyak 4.901 orang. Jika dibandingkan pada tahun 2021 jumlah pegawai di Kabupaten Berau secara keseluruhan sebesar 4.901 orang, terjadi penurunan jumlah pegawai sebesar 185 orang sedangkan dari segi perimbangan laki-laki tahun 2023 berjumlah 2.416 orang dan perempuan berjumlah 2.300 orang sedangkan pada tahun 2022 laki-laki berjumlah 2.540 orang dan perempuan 22.361 orang yang menunjukkan perimbangan gender yang baik.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara, SDM Kabupaten Berau berpendidikan S3 ada 1 orang, berpendidikan S2 sebanyak 323 orang (laki-laki 174 dan perempuan 149 orang), berpendidikan S1 berjumlah 2.324 (laki-laki 1.085 orang dan perempuan 1.239 orang), berpendidikan DIV/SM/DIII/DII/DI berjumlah 997 (laki-laki 368 orang dan perempuan 629 orang), berpendidikan SLTA/SLTP dan SD berjumlah 1.071 orang (laki-laki 788 orang dan perempuan 283 orang).

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	S.3	1	-	1
2	S.2	174	149	323
3	S.1	1.085	1.239	2.324
4	D.IV	43	26	69
5	SM	-	-	-
6	D.III	269	548	817
7	D.II	49	48	97
8	D.I	7	7	14
9	SLTA	688	264	952
10	SLTP	69	10	79
11	SD	31	9	40
	JUMLAH	2.416	2.300	4.716

Sumber Data Per 31 Desember 2023 BKPP Kab.Berau

Tabel 1.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	298	250	548
2	III	1.544	1.708	3.252
3	II	534	331	865
4	I	40	11	51
	JUMLAH	2.416	2.300	4.716

Sumber Data Per 31 Desember 2023 BKPP Kab.Berau

Tabel 1.3

Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Eselon Tahun 2023

No	Eselon	GENDER		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	-	-	-
2	II	25	8	33
3	III	126	47	173
4	IV	220	104	324
5	V	-	-	-
6	ESELON	371	159	530
7	NON ESELON	2.045	2.141	4.186
	JUMLAH	2.416	2.300	4.716

Sumber Data Per 31 Desember 2023 BKPP Kab.Berau

Tabel 1.4

Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Agama Tahun 2023

No	AGAMA	GENDER		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	ISLAM	2.199	1.993	4.192
2	KRISTEN PROTESTAN	143	231	374
3	KRISTEN KATHOLIK	62	70	132
4	HINDU	7	6	13
5	BUDHA	4	-	4
6	KONGHUCU	1	-	1
7	LAIN-LAIN	-	-	-
	JUMLAH	2.416	2.300	4.716

Sumber Data Per 31 Desember 2023 BKPP Kab.Berau

Tabel 1.5

Komposisi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau berdasarkan Usia Tahun 2023

No	Usia	GENDER		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	55-60	431	245	676
2	50-54	523	394	917
3	45-49	524	422	946
4	40-44	508	538	1.046
5	35-39	225	345	570
6	30-34	122	212	334

7	25-29	70	131	201
8	20-24	13	13	26
	JUMLAH	2.416	2.300	4.716

Sumber Data Per 31 Desember 2023 BKPP Kab.Berau

1.6 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Berau

a. Aspek Geografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi spasial dan mendasar dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Berau. Penjabaran aspek geografi dalam dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Berau baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Adapun, aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Secara astronomis Kabupaten Berau terletak antara 116^{0} Bujur Timur sampai dengan 119^{0} Bujur Timur dan 1^{0} Lintang Utara sampai dengan 2^{0}33' Lintang Selatan. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,17 Km2 yang terdiri dari daratan 23.558,50 Km2 dan lautan 10.568,85 Km2 sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Jika dilihat dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Berdasarkan posisi geografis, batas wilayah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan;
- Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
- Wilayah Timur dibatasi oleh Laut Sulawesi; dan
- Wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dengan potensi sumber daya alam yang tidak terbaharui cukup besar yakni berupa batu bara. Selain itu, terdapat potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Delapan kecamatan di Kabupaten Berau memiliki wilayah pesisir yaitu Kecamatan Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan lepas. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua sudah dikenal secara internasional sebagai daerah dan tujuan wisata dimana pantai dan alam bawah lautnya memiliki panorama yang indah. Di samping itu, Kabupaten Berau juga memiliki 31 pulau kecil dan wilayah laut yang cukup luas dengan keanekaragaman sumber daya hayati yang tinggi.

- Topografi

Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan Kabupaten Berau lebih banyak berbentuk gugusan bukit yang sebagian besar tidak dihuni oleh penduduk sehingga rata-rata kecamatan memiliki wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang minim. Wilayah daratan tidak lepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur hampir mencapai 100 Km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dengan bukit tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan Kabupaten Berau memiliki tujuh buah danau yang secara total memiliki luas kurang lebih 15 Ha.

❖ Hidrologi

Di Kabupaten Berau terdapat enam kecamatan yang dialiri oleh sungai dimana jumlah sungai secara total mencapai 20 aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Berau yang berada di Kecamatan Gunung Tabur dengan panjang mencapai 292 km dan Sungai Kelay di Kecamatan Kelay sepanjang 254 km.

b. Aspek Demografis

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan suatu wialayah.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 280.998 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 272.887 jiwa bertambah 8.111 jiwa. Penambahan ini terjadi karena angka kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan angka kematian. Kecamatan Tanjung Redeb merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian tentunya berada di kecamatan ini.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Berau
Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelay	5.280	5.881	6.352	6.807	7.225
2	Talisayan	13.528	14.823	15.980	16.637	17.020
3	Sambaliung	35.580	38.982	41.226	43.161	44.532
4	Segah	12.250	13.969	15.434	16.647	17.942

5	Tanjung Redeb	69.056	72.869	73.625	74.137	74.976
6	Gunung Tabur	24.035	26.357	28.270	30.040	31.394
7	Pulau Derawan	10.820	12.246	13.172	13.924	14.399
8	Biduk-Biduk	6.380	7.044	7.455	7.594	7.733
9	Teluk Bayur	29.728	31.526	32.746	33.835	34.960
10	Tabalar	6.841	7.329	7.451	7.756	7.917
11	Maratua	3.449	3.776	3.834	3.983	3.881
12	Batu Putih	7.735	8.471	8.831	9.209	9.519
13	Biatan	7.507	8.166	8.747	9.157	9.470
Total		**232.189**	**251.439**	**263.150**	**272.887**	**280.998**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Berau per 31 Desember 2023

Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Berau memiliki ketimpangan yang sangat tinggi. Ketimpangan kepadatan penduduk ini terjadi dikarenakan distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan dimana pada daerah pedalaman/terpencil pasti hanya memiliki jumlah penduduk yang sedikit jika dibandingkan wilayah yang lebih maju padahal daerah pedalaman/terpencil tersebut memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar daripada wilayah maju tersebut.

1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi dalam menganalisis perkembangan dan pembangunan ekonomi adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dimana perekonomian di Kabupaten Berau pertumbuhan ekonomi yang cenderung berfluktuatif dalam kurun waktu beberapa tahun terkahir ini. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat perkembangan suatu perekonomian akibat penambahan kuantitas yang diproduksi dan bukan karena perubahan harga. Dalam pengertian makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan nilai PDRB yang ditunjukkan oleh perubahan nilai total PDRB tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau yaitu 5,44 persen. Semua lapangan usaha di Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,95 persen.

Adapun rincian adalah sebagai berikut Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Berau (persen) 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Berau
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.03	-3,81	1,97	2,92	2,18
B	Pertambangan dan Penggalian	6.58	-4,49	7,04	3,31	5,47
C	Industri Pengolahan	4.42	-0,45	-3,10	3,59	4,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.80	6,32	0,69	3,34	8,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.73	6.02	4,13	5,75	5,51
F	Konstruksi	9.82	-9,17	0,79	7,34	9,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.08	1.60	2,40	6,03	5,34
H	Transportasi dan Pergudangan	2.39	-3,62	5,16	6,10	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.38	-3.63	1,48	7,72	5,63
J	Informasi dan Komunikasi	6.22	7.24	6,44	6,31	5,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.58	0.60	0.27	8,53	10,23

L	Real Estate	1.81	1.18	1.94	2,85	1,29
M,N	Jasa Perusahaan	2,87	2.87	6,44	5,17	6,14
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.60	-5.35	0,69	6,26	9,41
P	Jasa Pendidikan	3.53	4.88	4,54	4,77	4,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.69	19.65	21,14	4,73	4,81
R,S ,T,U	Jasa Lainnya	5.26	-2.04	1,94	6,84	5,95
Produk Domestik Regional Bruto		5,61	-3.35	5,36	3,95	5,44

Sumber: Berita resmi statistik 28 Februari 2024

**) angka sementara*

***) angka sangat sementara*

1.8 Alur Pikir Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau selama tahun 2023, capaian kinerja (*performance result*) 2023 diperbandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja masa datang. Alur pikir penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

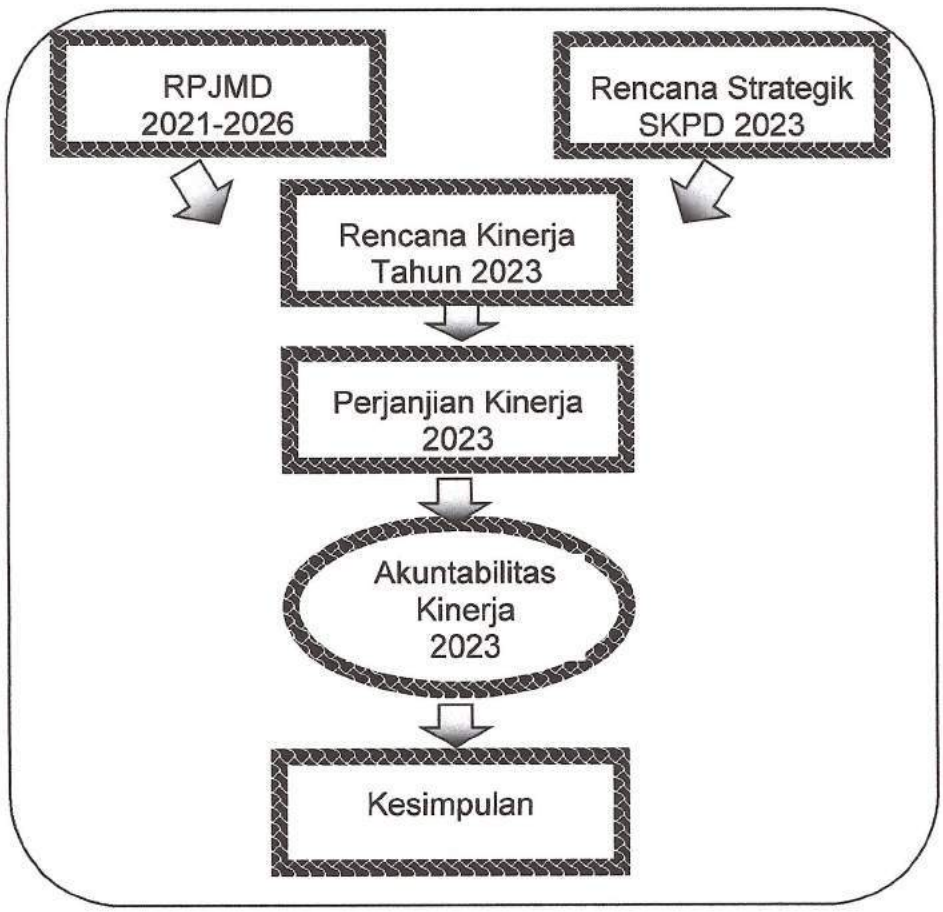

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Berau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Pemerintah Kabupaten Berau untuk periode 5 tahun. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, rencana pembangunan dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan oleh pemerintah pusat dan daerah yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk periode 2021-2026 RPJMD telah Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai Kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah, RPMJD Kabupaten sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang strategis di Kabupaten Berau, termasuk dalam perencanaan tahunan. Adapun visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tersebut adalah :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih "hijau". Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang

Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan unrenewable resources tetapi lebih pada (transformasi) renewable resources yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

Maju: Maju adalah suatu kondisi dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang saat ini. Berau yang maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.

Sejahtera: Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbaga aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang

Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.

Sumber Daya Manusia Yang Handal:

Sumber daya manusia (SDM(adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026, maka sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dan keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan.

Transformasi Ekononomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan:

Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kab.Berau selama ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertmabangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Berau. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan di sektor Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan seperti Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM/

Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumberdaya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia di masa mendatang.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. **Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka indeks pembangunan manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptkan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang dan sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (unite nation development progammer UNDP)

Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbuudi luhur.

Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2. **Misi Kedua: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirahusaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat

Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (unrenewable resources), khususnya di sektor Perkembangan dan Penggalian secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan (renewable resources), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3. Misi Ketiga: Meningkatnya sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efesien ke dan dari Kabupaten Berau. Disamping itu, telekomunikasi. Listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, indsutri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendatang terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semkain penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat ini dan terlebih lagi di masa akan mendatang, ekonomi digital dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus mengantisipasi tantangan pembangunan di era digital ini, dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan

ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampit ke semua jenis usaha.

4. **Misi Keempat: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaiannya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama	: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
Tujuan	: Mewujudkan masyarkat Berau yang berdaya saing.
Sasaran 1	: Meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan pendidikan.
Sasaran 2	: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan.
Misi Kedua	: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
Tujuan Pertama	: meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mantap dan berdaya saing.
Sasaran 1	: menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau.
Sasaran 2	: menurunnya angka kemiskinan.
Tujuan Kedua	: meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
Sasaran 1	: Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Sasaran 2	: Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism.
Sasaran 3	: Meningkatnya produksi sektor primer.

Sasaran 4	:	Meningkatnya ketahanan dan keberagamaankonsumsi pangan.
Misi Ketiga	:	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.
Tujuan Pertama	:	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastrukutur daerah.
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah.
Sasaran 2	:	Meningkatnya konekvitas antar wilayah.
Tujuan Kedua	:	Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup.
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Misi Keempat	:	Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
Tujuan	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.
Sasaran 1	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah.

Sasaran pembangunan daerah secara spesifik terangkai menjadi sebuah arsitektur kinerja berupa "impact" yang saling terhubung di mana indikator tujuan merupakan lagging indikator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indikator. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode .

Tabel 2.1

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Berau 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia Meningkat dari 74,71 Menjadi 76,69 Di akhir periode	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53	14,10	14,29	14,47	14,65	14,83	14,83
					Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	9,70	9,84	9,98	10,12	10,26	10,26
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	72,28	72,38	72,49	72,60	72,71	72,71
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70%	29,60%	44,90%	66,60%	99,90%	100,00%	100,00%
2	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi meningkat dari -3,35% menjadi 5,29% di akhir periode	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41	4,41
				Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84	4,84
		Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	PDRB Per Kapita meningkat dari 148,9 Juta/tahun menjadi 164,848 juta/tahun diakhir periode	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	Presentase Usaha mikro dan kecil	24,00%	0,00%	6,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	40,00%
				Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis *sustainable tourism*	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	na	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,03
				Meningkatnya Produksi Sektor Primer	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09	12,09
				Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	80	82	83	84,1	85,1	85,1

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Gini Menurun dari 0,300 Menjadi 0,280 di akhir periode	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	68,50
					Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20%	10,70%	11,20%	11,70%	12,70%	13,70%	13,70%
					Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	79,00	83,00	86,00	90,00	93,00	97,00	97,00
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%	13,00%	21,00%	23,00%	25,00%	30,00%	33,00%
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,84	99,94	99,94
					Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,2	0,2
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	50	55	60	65	70	75	75
					Indeks SPBE	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
		Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Emisi Gas Rumah Kaca Menurun dari 416.564 menjadi 342.901 diakhir periode	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79	56,79
					Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	85,87	85,97	86.07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,784	89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814	89,814

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari CC (53,25) menjadi BB (76) di akhir periode	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	BB (72)	BB (72)
					Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Survei Kepuasan Masyrakat	A (89,36)	A (89,66)	A (90,12)	A (92,16)	A (94,06)	A (96,26)	A (98)	A (98)
	4	6	6	13	25								

Sumber Baplitbang RPJMD 2021-2026

2.1.4 Strategi

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026. Strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.Rumusan strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Kabupaten Berau periode 2021-2026.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Tabel 2.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kab.Berau Tahun 2021-2026

Visi: ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"***		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur		
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangakauan pelayanan pendidikan, dilakukan melalui: 1. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif.
		2. Peningkatan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
		3. Pengembangan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan di Kab. Berau akan dilaksanakan melalui:
		1. Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
		2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;
		3. Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan
		4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
		5. Meningkatkan status akreditasi Puskesmas menjadi akreditasi Utama
		6. Memberikan dukungan penuh terhadap penanganan pandemi covid 19
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal		
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Upaya menurunkan angka pengangguran di Kab. Berau akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal;
		2. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;

Visi: ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"***		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
mantap dan berdaya saing		3. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;
		4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan;
		2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak COVID-19;
		3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan wirausahaan;
		4. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui:
		1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM;
		2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan aktivitas uasha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM;
		3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.
	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism*	Upaya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism* akan dilakukan melalui: 1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya;

Visi: ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"***		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
		2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha priwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata;
		3. Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata.
		Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif;
		2. Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif;
		3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.
	Meningkatnya produksi sektor primer	Upaya peningkatan produksi sektor primer akan dilakukan melalui:
		1. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak;
		2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas;
		3. Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup;
		4. Meningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian;

Visi: ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"***		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
		5. Pengembangan dan penguatan kemitraan yang ideal antar petani/pekebun dengan swasta, termasuk di dalamnya penyuluhan, penerapan *good agriculture practices*" dan meningkatkan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan;
		6. Peningkatan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan;
		7. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna;
		8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
	Meningkatnya ketahanan dan keberagakam konsumsi pangan	Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keragaman konsumsi pangan, akan dilakukan melalui upaya:
		1. Meningkatkan diversifikasi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
		2. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani;
		3. Melakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap daerah rawan pangan; dan
		4. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan.
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan		
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya Kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Upaya peningatan kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar akan dilakukan melalui:
		1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
		2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah;
		3. Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
		4. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
		5. Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
		6. Peningkatan pelayanan jaringan air minum;
		7. Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu;
		8. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase;
		9. Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;
		10.Mengurangi luasan lahan kumuh;
		11.Mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dari berbagai stakeholder;
		12.Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, dan
		13.Memaksimalkan tugas dan fungsi POKJA PKP dan Forum PKP Kabupaten Berau dalam mendukung kebijakan pengurangan luasan Kawasan kumuh.
		Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah akan dilakukan melalui:

Visi: ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"***		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
		2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; dan
		3. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah.
Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Upaya meningkatkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan dilakukan melalui:
		1. Pengawasan dan pengendalian, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas berbagai kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup;
		2. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, meliputi pengembangan taman keanekaragamanan hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, dan Ruang Tebuka Hijau (RTH);
		3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
		4. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
		5. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
		6. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
		7. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
		8. Optimalisasi upaya pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pihak swasta.
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui:
		1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
		2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat;
		3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui:
		1. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan
		2. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi.

2.1.5 Program Pembangunan Daerah

A. Program Prioritas I : Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:

a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
d) Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

B. Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2021- 2026, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki 18 janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau. 18 janji kampanye tersebut antara lain:

1) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP;
2) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT;
3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis;

4) Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu;
5) Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
6) Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung;
7) Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota;
8) Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu;
9) Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD);
10) Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung;
11) Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat;
12) Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19;
13) Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain);
14) Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi;
15) Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata;
16) Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM;
17) Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi;
18) Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb,Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	

6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya,	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar

	Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
16	Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskoperindag
	Tata Kelola Pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	

17	Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
18	Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Kawasan Pemukiman	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

Program-program pembangunan Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan dua puluh enam (26) urusan wajib dan delapan (8) urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, disamping untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra Perangkat Daerah yang antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat. Program-program ini, dalam perumusannya, dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.

- **Program-program pembangunan tersebut adalah:**

  Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam

  Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Misi,Sasaran dan Program yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Misi	Sasaran	Program Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah		Pengampu Program
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rsud Abdul Rivai
			8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rsud Abdul Rivai
			9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi Ke II					
2	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal	3. Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			12	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4. Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			14	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah
			18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		5. Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			20	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			22	Program	Dinas Koperasi,

				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan
			23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		6. Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			26	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			28	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		7. Menigkatnya Produksi Sektor Primer	29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan
			32	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan
			33	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan
			34	Program	Dinas Pertanian dan

				Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peternakan
			35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			37	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			38	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		8. Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
			43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
			44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
Misi Ke III					
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang	9. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan	45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan	Dasar	46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			48	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			49	Program Penyelenggaraa n Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			50	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			51	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			52	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pertanahan
		10. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	55	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			56	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			57	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung	58	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

		Lingkungan Hidup		Kerusakan Lingkungan Hidup	
			59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			60	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi Ke IV					
4	**Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel**	12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	61	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			65	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan,Penelitiaan dan Pengembangan
			66	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan,Penelitiaan dan Pengembangan
			67	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			68	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat

			69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
			70	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
			71	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		13. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			74	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			75	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
			76	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2.1.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan timur bersama ini sasarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau

No	Prioritas Sasaran	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1. Harapan lama sekolah
		2. Rata-rata lama sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3. Angka harapan hidup
		4. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5.Tingkat Pengangguran terbuka
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7. Presentase Usaha mikro dan kecil
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10. Score pola pangan harapan
9	Meningkatnya Kualitas	11. Proporsi panjang

	Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	jaringan jalan dalam kondisi baik
		12. Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan
		13. Capaian Akses Air Minum Layak
		14. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		15. Persentase rumah tangga pengguna listrik
		16. Rasio rumah layak huni
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17. Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten
		18. Indeks SPBE
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air
		20. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara
		21. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22. Opini BPK
		23. Nilai/Predikat AKIP
		24. Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab. Berau
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25. Survei Kepuasan Masyarakat

2.1.7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2023 Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persen	14,29
				2	Rata-rata lama sekolah	Persen	9,84
		2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persen	72,38
				4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	44,90
2	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat	3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	4,73

	yang mantap dan berdaya saing	4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	5,01
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	Persen	3,00
		6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,99
		7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86
		8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82
4	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	67
				12	Capaian akses Air Minum	Persen	11,20

					Jaringan Perpipaan		
				13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	86
				14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	21
				15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,69
				16	Rasio rumah layak huni	Persen	0,197
		10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persen	0,6
				18	Indeks SPBE	Indeks	1,4
5	Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	56,49
				20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,17
				21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,799
6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP
				23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	67
				24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan	Status	Tinggi

					Daerah kab. Berau		
		13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaran daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori /Nilai	92,16

2.1.8 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan adanya perjanjian kinerja maka diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mecapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pengampu
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persen	14,29	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata lama sekolah	Persen	9,84	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persen	72,38	Dinas Kesehatan
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	44,90	Dinas Kesehatan
3	Menurunnya angka	5	Tingkat Pengangguran	Persen	4,73	Disnakertrans

	pengangguran di Kab.Berau		terbuka			
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	5,01	Dinas Sosial
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	Persen	3,00	Disprindakop
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,99	Disbudpar
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	Dinas Pertanian dan Peternakan ,Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	Dinas Pangan
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	67	DPUPR
		12	Capaian akses Air Minum	Persen	11,20	DPUPR

			Jaringan Perpipaan			
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	86	DPUPR
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	21	DPUPR
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,69	DPUPR
		16	Rasio rumah layak huni	Persen	0,197	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persen	0,6	Dinas Perhubungan
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	Kominfo
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	56,49	DLHK
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,17	DLHK
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,799	DLHK
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	67	Bagian Organisasi
		24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan	Status	Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan

			Daerah kab. Berau			
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaran daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori /Nilai	92,16	Bagian Organisasi

BAB III

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Berau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan kinerja Tahun Kedua dari RPJMD 2016-2023 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dimana Perjanjian Kinerja Kabupaten Berau Tahun 2023. Untuk perhitungan presentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Target tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Target tingkat capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Berau Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan informasi yang akuntabel dan transpran dalam pertanggungjawaban dana yang telah digunakan dan untuk memastikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kepada publik telah dicapai, untuk dapat mengukur pencapaian kinerja maka dilakukan pengumpulan data dan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan-keberhasilan atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kriteria Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

- Langsung
- Obyektif
- Kuantitatif
- Terinci
- Praktis
- Dapat Diyakini
- Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran sasaran.

3.1 Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau atas implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya, dengan rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Berau 2018-2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Peningkatan / Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	20,16	21,28	21,43	21,52	0,42%
2	Pengukuran Kinerja	25	15,80	15,84	15,98	15,53	-2,82%
3	Pelaporan Kinerja	15	10,00	10,05	10,22	10,50	2,74%
4	Evaluasi Internal	10	4,74	5,51	5,66	5,71	0,88%
5	Capaian Kinerja	20	9,36	10,18	10,21	10,48	2,64%
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**60,06**	**62,86**	**63,50**	**63,74**	**3,87%**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**	**B**	

Pada tahun 2023 evaluasi SAKIP Pemerintah berpedoman pada peraturan Permenapan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini menitikberatkan pada ***"perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja"***. Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,40 dengan predikat "B", yaitu implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.2

Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Berau 2022-2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,42	0,22%
2	Pengukuran Kinerja	30	17,66	17,94	0,28%
3	Pelaporan Kinerja	15	9,96	10,06	0,10%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	11,80	11,98	0,18%
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**61,62**	**62,40**	**0,78%**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	

Hasil evaluasi tahun 2023 **"jika dibandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 0,78 poin.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

   Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beebrapa catatan sebagai berikut :

   - Sebagian besar rumusan kinerja sasaran dan indikator baik pada level Pusat/Pemda maupun PD belum memenuhi kriteria kualitas yang baik, terkait dengan karakteristik terukur, relevan, orientasi hasil, dan tepat level pengampu kinerjanya;
   - Sebagian sasaran kinerja pada PD belum dapat menggambarkan isu strategis atau alasan utama eksistensi PD tersebut;
   - Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat

serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar PD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

   Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

   - Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui Aplikasi e-sakip yang dapat diakses melalui esakipberaukab.com namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Hal ini terlihat masih ditemukan sebagian besar PD yang belum secara aktif dan update dalam pengukuran capaian kinerja secara, dan belum terlihat adanya feedback perbaikan dari pimpinan terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai baik di level Kabupaten maupun PD;
   - Pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment

3. Pelaporan Kinerja

   Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

   - Pemerintah Kabupaten Berau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan dipublikasikan melalui website pemda. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja tingkat pusat di antaranya sebagai berikut:

a. Telah memuat informasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam mencapai kinerja, namun belum cukup komprehensif dan mendetail sehingga sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
b. Telah memuat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, namun perlu diperhatikan kembali keandalan perhitungan data yang disajikan. Selain itu, belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki.

- Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Berau sudah disertai

  dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan tingkat efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak dan beberapa perangkat daerah yang lain memiliki informasi yang lebih lengkap seperti menginformasikan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

   Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

   - Pelaksanaan evaluasi internal belum disertai dengan pedoman pelaksanaan sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Monitoring secara berkala atas temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada OPD belum dilakukan secara berkala.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant dan timebound) dan cukup baik level Pemda maupun PD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat mereviu kesesuaian level pengampu kinerja yang ada;
2) Memastikan rumusan kinerja pada tingkat PD berangkat dari isu strategis dan alasan utama eksistensi PD tersebut;
3) Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang di Pemerintah Kabupaten Berau;
4) Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pirmpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk kontrol terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
5) Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;

6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
7) Memastikan keandalan dan ketepatan data tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat pusat dan unit/satuan kerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;
8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan benchmark dari kabupaten, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit perangkat daerah;
9) Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10) Inspektorat untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
11) Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi

tersebut telah sesuai dengan yang di inginkan oleh evaluator internal.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil *(outcome)* yang ingin dicapai , keluaran *(output)* maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun kategori dalam penilaian evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kategori penilaian peringkat

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangar memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis,adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	(Nilai >80-90)	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator).
3	BB	(Nilai >70-80)	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja pendukung.

			Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator
4	B	(Nilai>60-70)	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	(Nilai >50-60)	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	(Nilai>30-50)	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	(Nilai >0-30)	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat

			mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : Kementerian PAN dan RB

Secara umum Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	%	14,29	13,36	93,49
		2	Rata-rata lama sekolah	%	9,84	9,56	97,15
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	%	72,38	73,45	101,48
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	44,90	100	222,72
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	persen	4,73	4,95	95,34
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	persen	5,01	5,54	89,42
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	persen	3,00	1,04	34,66
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,99	1,38	139,39

7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	11,26	94,94
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	86,9	105,98
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67	67,05	100,07
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,20	79,84	712,86
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	persen	86	81,70	95
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	21	73,61	350,52
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,69	99,99	100,30
		16	Rasio rumah layak huni	persen	0,197	0,2000	101,52
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,6	0,75	125
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,02	144,29
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	56,49	53,55	94,41
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,17	85,17	98,84
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,799	93,76	104,41
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	67	62,40	93,13
		24	Status Kinerja Penyelenggaran	Status	Tinggi	3,1964 (sedang)	93,74 (sedang)

			Pemerintahan Daerah kab. Berau				
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/ Nilai	92,16	92,16	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapain kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Berau menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel.3.5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% -100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang 55%	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran, dengan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi III terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran, dan 4 indikator kinerja.

Dari uraian diatas maka capaian sasaran dalam visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 6 indikator kinerja.
- Misi III terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator kinerja.
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.
- 13 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.6

Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Indikator Kinerja Utama
1	Misi 1	1	2	4	BS = 2, B = 2, C = - , K = -
2	Misi 2	2	6	6	BS = 2, B = 3, C = - , K = 1
3	Misi 3	2	3	11	BS = 6, B = 5, C = - , K = -
4	Misi 4	1	2	4	BS = -, B = 4, C = - , K = -

Dari 13 (Tiga Belas) sasaran dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama, pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja
MISI I (4 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	2
2	Baik	2
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	4
MISI II (6 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	2
2	Baik	3
3	Cukup	-
4	Kurang	1
	Jumlah	6
MISI III (11 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	6
2	Baik	5
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	11
MISI IV (4 Indikator Kinerja)		
1	Baik Sekali	-
2	Baik	4
3	Cukup	-
4	Kurang	-
	Jumlah	4

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Berau Tahun 2023 yang di evaluasi dan analisis dalam pencapaian kinerja ada 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Berau Tahun 2023, penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

A. Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

I. Tujuan Mewujudkan masyarakat Berau yang berdaya saing

Tujuan Mewujudkan masyarakat Berau yang berdaya saing dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 4 (empat) indikator sasaran :

Tujuan Menyediakan Infrastruktur yang Mantap dan Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
1.Mewujudkan masyarakat berau yang berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah
		2. Rata-rata Lama Sekolah

1. Sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan".

Pendidikan merupakan yang terpenting yang pelu diperhatikan dan ditingkatkan kualitas dan layanan pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang mantap dan berkualitas.

Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Berau. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan 2 (dua) indikator kinerja rata-rata mencapai 96,52 dan termasuk predikat **"Baik ".**

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,29	13,36	93,49
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,84	9,56	97,15

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Harapan Lama Sekolah	%	13,33	13,35	13,36
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,53	9,54	9,56

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,83	13,36	90,09
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	10,26	9,56	93,18

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Harapan Lama Sekolah	%	13,36	13,15	+
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,56	8,77	+

1. Indikator harapan lama sekolah

   Harapan lama sekolah merupakan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian harapan lama sekolah tahun 2023 adalah 13,36 tahun atau dengan persentase 93,49 %. Capaian ini melebihi standara nasional 13,15 tahun, maupun tahun 2022 sebesar 13,35 tahun.

2. Indikator Rata-rata lama sekolah

   Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indicator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indicator indeks pembangunan manusia (IPM). Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2023 adalah 9,56 tahun atau dengan persentase capaian 97,15% dari target 9,84. Jika dibandingkan pada tahun 2022 adalah 9,54 tahun dan standar nasional 8,77 tahun artinya masih melebihi dan terjadi peningkatan. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Berau

Permasalahan:

1. Himpitan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang.
2. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan terutama pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.
3. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Akses sarana pendidikan yang masih sulit terjangkau oleh masyarakat pedalaman.

Solusi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Pemberiaan bantuan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu.
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
4. Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu.
5. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah.
6. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi.
7. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2. **Sasaran "Meningkatknya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan".**

Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman. Jumlah tenaga kesehatan 1.451 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan 1.552 pada tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 masih dalam proses pembaharuan data.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan rata-rata capaian 162,1 dan termasuk predikat **"Baik Sekali".**

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Angka harapan hidup	%	72,38	73,45	101,48
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	44,90	100	222,71

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
3	Angka harapan hidup	%	72,32	72,32	73,45
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	-	82,81	100

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
3	Angka harapan hidup	%	72,71	73,45	101,02
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
3	Angka harapan hidup	%	73,45	73,93	-
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	-	-

3. Indikator angka harapan hidup

   Hasil pengukuran Indikator capaian dari target 72,38 terealisasi sebesar 101,48 persen, artinya setiap bayi lahir memliki peluang hidup sampai dengan usia 72-73 tahun. Namun demikian, masih dibawah realisasi

capaian nasional, yaitu 73,93. Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartiakn pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Angka harapan hidup (AHH) dihitung berdasarkan *data age specific deat rate* yang tersusun dalam sebuah tabel kematian. Angka harapan hidup adalah sarana evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator angka harapan hidup (AHH) memperkirakan banyaknya tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk melihat output pembangunan kesehatan. Tingkat kesehatan yang lebih baik akan membawa peluang pada individu untuk bertahan hidup lebih lama. Hal ini tentunya harus didukung mudahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga seseorang yang sakit mudah untuk mendapatkan perawatan.

4. **Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan**

   Hasil pengukuran Indikator capaian proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan target 44,90 dengan realisasi mencapai 100 capaian kinerja 222,72 persen.

   Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 sistem jaminan sosial nasional bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatnan martabatnya menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Permasalahan :

1. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. ada bebrapa hal yang mempengaruhi angka harapan hidup, salah satunya berkaitan dengan derajat kesehatan Masyarakat. faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan Masyarakat yaitu angka kematian ibu dan bayi, permasalah kesehatan lingkungan serta beberapa penyakit menular dan tidak menular.
2. masyarakat sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem jaminan pembiayaannya. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat peserta bukan penerima upah dan bukan perserta yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU BP Pemda) baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier.

Solusi :

1. Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan.
2. Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Imunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melakukan Survey Indek Keluarga Sehat serta Perbaikan kesehatan lingkungan.
4. Penerima upah dan bukan perserta yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU BP Pemda) merupakan peserta/masyarakat yang didaftarkan jaminan kesehatannya sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem jaminan sosial nasional sebagai peserta program jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan Kelas 3 yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

B. Misi II : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangankerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Tujuan ke Dua : Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat yang Mantap dan Berdaya Saing

Tujuan Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Berau dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 2 (dua) indikator sasaran :

Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat yang Mantap dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat yang Mantap dan Berdaya Saing	3.Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5. Tingkat pengangguran terbuka
	4.Menurunnya angka kemiskinan	6. Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan

3. **Sasaran** "Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau"

Sasaran menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau masih menjadi perhatian khusus dalam mengurangi tingkat pengganguran terbuka. Peningkatan penganggur pada suatu wilayah tidak hanya berdampak lemah perekonomian melainkan juga masalah sosial.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau" mencapai 104,65, persen dan termasuk predikat **"Baik Sekali".**

Realisasi Kinerja Indikator

Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,73	4,95	95,34

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,82	5,02	4,95

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,41	4,95	87,76

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,95	5,32	-

5. Indikator Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah pengangguran bertambah 692 orang tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 5,02 persen tahun 2023 menjadi 4,95 persen pada 2023. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 129.561 orang, bertambah 21.398 orang dibandingkan kondisi pada tahun 2023. Keadaan tenaga kerja Kabupaten Berau tahun 2023 Penduduk usia kerja (PUK) 193.65 orang , angkatan kerja sebesar 129,56 orang, Penganguran sebesar 6.407 orang dan Bukan angkatan kerja sebesar 74.333 orang.

Permasalahan:

1. Kurang balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja untuk meningkatkan SDM.
2. Kurangnya kesempatan lapangan kerja.

Solusi:

1. Adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan sebagai unit pelaksana pelatihan bagi pencari kerja.
2. Mengadakan pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Membuka lapangan kerja yang bersifat padat karya daripada padat modal.
4. Menarik investor agar menambah lapangan pekerjaan.
5. Penguatan informasi bursa kerja dan keterampilan para tena kerja.

6. Sasaran"Menurunnya Angka Kemiskinan"

Keberhasilan suatu pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu perekonomian bagi masyarakat dapat dilihat dari indicator kemiskinan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini indicator kemiskinan yang ada di Kabupaten Berau.

Indikator kemiskinan Kabupaten Berau 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan	568.500	595.550	624.948	-
2	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa	12,30	13,62	13,31	13,26
3	Persentase Penduduk Miskin	5,19	5,88	5,65	5,54
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,70	0,95	0,98	-
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,17	0,20	0,22	-

Sumber statistic daerah kab.Berau 2023

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5,01	5,54	89,42

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5,88	5,65	5,54

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4,84	5,54	85,54

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5,54	9,36	-

7. Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan

   Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemisikinan, dimana garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori pe kapita per hari ditambah kebutuhan minuman non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Angka kemiskinan untuk tahun 2022 sebesar 5,65 ada kenaikan jika dibandingkan pada 2021 sebesar 5,88 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan dari target 5,01 terealisasi 5,50 dengan capaian 90,22 %. Sedangkan untuk tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Berau sebesar Rp.677.819,- per orang per bulan. Angka ini terus meningkat sejalan dengan harga barang dan jas kebutuhan yang naik. Dengan garis kemiskinan tersebut, terdapat sebanyak 5,88 persen atau sekitar 13.620 jiwa yang dikateogrikan sebagai penduduk miskin.

Permasalahan:

1. Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
2. Belum terpadunya bantuan peningkatan ekonomi berbasis data terpadu kesejahteraan sosial.
3. Belum optimalnya bantuan pengembangan usaha pada sektor produktif.
4. Masalah sosial, suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Solusi:

1. Perluasan kesempatan kerja masyarakat
2. Membuka dan memperluas lapangan usaha secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan daya saing manusia melalui pendidikan menjadi modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik.
5. Bantuan peningkatan ekonomi semua perangkat daerah berbasis data terpadu kesejahteraan sosial

III. Tujuan Ketiga : Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Tujuan Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 4 (empat) indikator sasaran :

Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	5.Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7. Presentase Usaha mikro dan kecil
	6. Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
	7. Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	8. Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10. Score pola pangan harapan

5. **Sasaran** "Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)

Jumlah UMKM di Kabupaten Berau Tahun 2023 Usaha Mikro sebesar 14.207, Usaha Kecil berjumlah 289 sedangkan Usaha Menegah 14 yang termasuk dalam 13 Kecamatan.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	3,00	1,04	34,66

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	304,98	10,41	1,04

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	3	1,04	34,66

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	1,04	-	-

7. Indikator Presentase Usaha mikro dan kecil

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan satu miliar rupiah, tanpa termasuk tanah dan bangunan.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dan memiliki modal usaha lebih dari satu miliar sampai dengan lima miliar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha besar dan memiliki modal usaha lebih dari lima miliar sampai dengan 50 miliar.

Untuk mendukung UMKM di Kabupaten Berau Pemerintah melalui Dinas Koperindag telah melakukan berbagai program kegiatan yang terkait peningkatan sumber daya manusia di keterampilan para pelaku dan calon pelaku UMKM. Selain itu juga diadakan pelatihan-pelatihan guna peningkatan UMKM di Kabupaten Berau. Hal ini bisa dilihat bahwa UMKM setiap tahun mengalami kenaikan dimana target pada tahun 2023 sebesar 3 persen terealisasi sebesar 1,04 persen. Untuk daftar UMKM kami disetiap kecamatan dapat kami sajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.9
REKAP DATA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah UMKM
Tanjung Redeb	5394	140	13	5547
Sambaliung	2604	55	0	2659
Teluk Bayur	1447	2	0	1449
Gunung Tabur	1042	19	0	1061

Segah	140	7	0	147
Tabalar	490	12	0	502
Biatan	46	4	0	51
Kelay	52	3	0	55
Talisayan	650	24	0	674
Batu Putih	341	10	1	351
Biduk-biduk	825	11	0	836
Maratua	338	2	0	340
Pulau Derawan	779	0	0	779
KTP Luar Berau	59	0	0	59
Total	**14207**	**289**	**14**	**14510**

Sumber : Diskoperindag per desember 2023

Permasalahan:

1. Sebagian UMKM pada tahun 2020-2022 sudah tidak aktif lagi pada tahun 2023, sehingga kenaikan UMKM pada tahun 2023 sangat kecil dan tidak mencapai target.

Solusi:

1. Perlu adanya pembenahan data UMKM.

Tabel 3.8
DAFTAR UMKM TAHUN 2020 - 2023

Kecamatan	Jumlah UMKM			
	2020	2021	2022	2023
Tanjung Redeb	884	4592	5539	5547
Sambaliung	602	2419	2645	2659
Teluk Bayur	346	1321	1441	1449
Gunung Tabur	104	988	1058	1061
Segah	52	131	131	147
Tabalar	79	502	502	502

Biatan	32	51	51	51
Kelay	33	55	55	55
Talisayan	386	673	673	674
Batu Putih	300	351	351	351
Biduk-biduk	69	836	836	836
Maratua	200	340	340	340
Pulau Derawan	147	779	779	779
KTP Luar Berau	59	59	59	59
Total	**3293**	**13097**	**14460**	**14510**

6. Sasaran "Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism"

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,99	1,38	139,39

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,75	1,38	1,38

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Pencapaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,03	1,38	133,98

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,38	3,83	-

8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan salah satu indikator kinerja daerah Kabupaten Berau, dengan sasaran strategis : Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism. Target Kinerja Daerah untuk PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2023 adalah 0,99%, sedangkan untuk data realisasi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2023 berdasarkan informasi yang diperoleh dari Biro Pusat Statistisk Kabupaten Berau masih dalam proses perhitungan sehingga data diatas masih menggunakan data realisasi tahun 2022 , dan belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi PDRB pada Tahun 2023.

Adapun realisasi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2022 sampai dengan triwulan 4 yaitu senilai 1,38%, sedangkan target kinerja daerah untuk tahun 2022 adalah 0,98%. Jika dibandingkan dengan angka PDRB Sektor Pariwisata tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang menunjukkan angka 1,75%, maka terjadi penurunan senilai 0,37 %. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupeten Berau pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sejumlah 372.022 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 371.739 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 283 orang. Hasil Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau pada tahun 2023 mengalami kenaikan, yaitu sejumlah 422.592 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 420.926 dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.666 orang.

PDRB sektor pariwisata merupakan bagian dari percepatan petumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, dimana dikenal sebagai daerah wisata alam bawah laut baik oleh wisatawan domesti maupun mancanegara. Beberapa tempat wisata yang menarik yaitu Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki dan Pulau Kakaban serta adanya Labuan Cermin di Biduk-biduk. Sehingga hal inilah yang menarik para pengunjung untuk datang ke Kabupaten Berau. Untuk rekapan kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau sebagai berikut :

Rekapitulasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau

Tahun 2013-2023

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN		JUMLAH
		WISMAN	WISNUS	
1	2013	4.026	80.753	84.779
2	2014	10.728	27.553	38.281
3	2015	6.119	99.416	105.535
4	2016	2.573	127.450	130.023
5	2017	4.376	203.404	207.780
6	2018	2.586	283.294	285.880
7	2019	8.323	292.692	301.015
8	2020	220	127.176	127.396
9	2021	85	141.398	141.483
10	2022	283	397.054	397.337
11	2023	1.666	420.926	422.592
TOTAL		40.985	2.201.116	2.242.101

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau

Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2023

No	Bulan	Wisatawan Mancanegara				Wisatawan Domestik			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Januari	89	1	-	78	32.327	12.057	23.642	37.640
2	Februari	81	-	-	54	15.539	6.273	14.926	19.505
3	Maret	22	-	4	54	8.852	8.934	14.474	17.853
4	April	1	17	5	235	1.352	9.117	9.476	32.247
5	Mei	-	22	7	97	1.912	13.165	51.837	18.967
6	Juni	-	13	10	114	4.260	15.090	24.818	30.881
7	Juli	2	-	61	165	4.448	7.348	38.408	22.937
8	Agustus	-	-	50	221	9.299	5.899	24,799	31.111
9	September	4	-	60	338	5.132	8.332	9.874	55.121
10	Oktober	-	2	28	175	4.785	11.745	29.986	31.709
11	Nopember	4	-	10	85	8.948	9.743	87.753	80.020
12	Desember	-	30	48	50	22.736	33.695	87.753	42.935
	Jumlah	**203**	**85**	**283**	**1.666**	**119.590**	**141.483**	**397.054**	**420.926**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Berau

Beberapa kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian realisasi yang masih rendah maupun kegiatan lainnya adalah :

1. Infrastruktur berupa aksesibilitas yang mendukung pengembangan pariwisata seperti jalan, pelabuhan, alat-alat transportasi dan lainnya di berbagai destinasi wisata masih kurang, sehingga keterjangkauan objek wisata belum sepenuhnya baik dan hal tersebut menyebabkan biaya perjalanan wisata menjadi tinggi. Fasilitas penunjang untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan di beberapa destinasi wisata juga masih kurang.
2. Kualitas SDM pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih kurang, sementara sektor pariwisata merupakan sektor yang berfokus kepada jasa atau pelayanan.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan retribusi di masing-masing objek wisata.

4. Masih Kurangnya tenaga pengelola retribusi di beberapa objek wisata.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 adalah :

1. Perlunya terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau, baik itu terkait aksesibilitas maupun fasilitas pendukung lainnya.
2. Pengembangan dan pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kompetensi dan keahlian dalam berinteraksi dan memberikan kepuasan terhadap wisatawan.
3. Perlunya dibuat peraturan terkait pengelolaan retribusi di masing-masing objek wisata.
4. Berkolaborasi dengan pihak kampung atau anggota Pokdarwis setempat terkait kebutuhan tenaga pengelola retribusi di beberapa objek wisata.

7. Sasaran "Meningkatnya Produksi Sektor Primer"

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan target 11,86 dapat terealisasi sebesar 11,26 % dengan tingkat capaian adalah 94,94%. Produksi Pertanian meliputi padi (padi sawah dan ladang) , produktivitas jagung dan produktivitas cabai (besar,keriting dan rawit).

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11,86	11,26	94,94

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11,73	9,33	11,26

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	12,09	11,26	93,13

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11,26	-	-

9. Indikator Kontribusi Sektor Pertanian,Kehutanan dan Perikanan

Dari target padi 3,26 ton/ha terealisasi 3,04 ton/ha dengan tingkat capaian 93,25%, untuk jagung dari target 5,75 ton/ha teralisasi 4,83 ton/ha dengan tingkat capaian 84% sedangkan produktivitas cabai target 3,90 ton/ha realisasi sebesar 5,09 ton/ha capaian 130,51%.

Pencapaian yang mendukung produktivitas pertanian padi, jagung dan cabai adalah kondisi alam, tersedianya sarana pertanian (bantuan alat mesin pertanian, bantuan benih, pupuk dan pestisida), tersedianya prasarana pertanian (jaringan irigasi , pintu air DAM parit, jalan usaha tani,

lantai jemur dan embung) serta pelatihan penyuluh, pembinaan kelembagaan kelompok tani serta adanya pendampingan PPL. Sedangkan untuk sektor perikanan target produksi perikanan tangkap tahun 2023 yaitu 24.824,78 ton dengan realisasi 23.941,08 ton.

Produksi perikanan secara umum meningkat, ini terlihat dari jumlah produksi Tahun 2023 dan harga jual per komoditi. Hal ini berdampak pada kontribusi sektor perikanan dalam memberikan sumbangsih bagi PDRB Kabupaten di sektor pertanian dalam arti luas. Daya beli masyarakat Berau secara umum meningkat, hal ini terlihat dari kenaikan daya beli dan produksi sektor perikanan karena terdampak dari sektor tambang/ sawit yang kembali bergairah, dimana banyak ijin lokasi dan operasional yang diajukan oleh sektor tersebut.

Nilai PDRB pertanian dipengaruhi nilai produktivitas. Pada tahun 2023 produktivitas padi dan jagung mengalami penurunan

Permasalahan :

1. Belum adanya informasi terkait konsumsi ikan per orang/ kapita/ tahun.
2. Belum adanya informasi harga yang disepakati komoditi ikan sebagai acuan perhitungan PDRB.
3. Kemarau panjang (Kemarau yang panjang menyebabkan tanaman kekurangan suplai air, sehingga petumbuhan tanaman tidak optimal).
4. Serangan hama penyakit tanaman; Permasalahan sumber air (Lahan yang sumber airnya dari bendungan terkendala pada saluran pembawa yang belum optimal/rusak baik saluran pembawa primer sekunder dan tersier sehingga air terkendala untuk sampai kelahan sawah, maupun saluran pembuangan.
5. Lahan yang sumber airnya dari tadah hujan dan pasang surut tergantung pada alam).
6. Debit air bendungan yang semakin menurun menjadi faktor kekurangan air pada lahan persawahan.
7. Ketersediaan saluran tersier yang belum optimal ; Alat mesin pertanian terutama alat pengolah tanah masih terbatas.

Solusi:

1. Up date terkait data indeks konsumsi ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim.
2. Perlu adanya kesepakatan harga komoditi ikan sebagai acuan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat untuk peningkatan PDRB.
3. Pada saat kemarau menanam varietas yang toleran terhadap kekeringan dan pompanisasi.
4. Pengendalian stop spot pada saat serangan hama penyakit tanaman
5. Pendataan kebutuhan Prasarana dan Sarana Pertanian
6. Pemenuhan Prasarana penunjang kebutuhan air seperti saluran tersier, Dam Parit, Pintu Air serta sarana alat mesin pengolah tanah dan pompa air (Terutama untuk lahan yang menggunakan air dari pasang surut dan tadah hujan perlu di buatkan DAM Parit dan pintu – pintu air selain untuk menampung air juga dapat digunakan untuk mengatur air di lahan-lahan persawahan).

8. **Analisis Sasaran** "Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan"

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian
10	Score pola pangan harapan	score	82	86,9	105,98

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
10	Score pola pangan harapan	score	84,0	89,5	86,9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
10	Score pola pangan harapan	score	85,1	86,9	102,12

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
10	Score pola pangan harapan	score	86,9	9,41	-

10. Indikator score pola pangan

Capaian realisasi Skor Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023 adalah sebesar 86,9 poin dengan target sebesar 82 poin dengan capaian kinerja sebesar 105,98 persen, capaian ini melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Hal ini disebabkan karena semakin beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Berau, walaupun masih belum memenuhi kaidah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. PPH merupakan indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, jika score PPH semakin mendekati 100, maka konsumsi pangan masyarakat beragam dan bergizi seimbang.

Dari hasil capaian PPH konsumsi Kabupaten Berau Tahun 2023, yaitu sebesar 86,9 yang melampaui target kinerja PPH tahun 2023 yang telah ditetapkan di RPJMD, dengan komposisi over konsumsi pada padi-padian (terutama konsumsi beras dan tepung) yaitu sebesar 51,5% dari nilai ideal sebesar 50%, pangan hewani sebesar 15,9% dari nilai ideal 12%, serta minyak dan lemak sebesar 11,9% dari nilai ideal 10%. Sedangkan untuk kelompok pangan yang juga harus mendapat perhatian karena nilai konsumsinya yang masih rendah dibandingkan nilai ideal

adalah konsumsi sayur dan buah, kacang-kacangan serta konsumsi umbi-umbian. Angka inilah yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Berau belum beragam dan bergizi seimbang.

Jika dibandingkan dengan nilai PPH Indonesia tahun 2023 yaitu sebesar 94,1 point, berdasarkan AKE (angka kecukupan energi) 2.100 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) 57 gr/kapita/hari maka skor PPH Kabupaten Berau masih di bawah PPH Nasional, sehingga masih perlu upaya peningkatan nilai PPH, dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah, kacang-kacangan serta umbi-umbian dan mengurangi konsumsi beras dan tepung. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau adalah dengan percepatan penganekaragaman pangan ke arah konsumsi pangan lokal non beras terigu serta meningkatkan kkonsumsi sayur-sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan (P2L). Dengan kegiatan ini diharapkan akan mengurai ketergantungan masyarakat akan konsumsi beras dan terigu seerta meningkatkan konsumsi sayur-sayuran dan umbi-umbian.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan analisa kami program dan kegiatan yang bisa menunjang keberhasilan capaian kinerja skor konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) pada dokumen RPJMD adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat. Pagu Anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.419.311.000,- dengan capaian realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.728.918.984,- atau persentase capaian sebesar 79.80 %
   a) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
      - Sub Kegaitan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

b) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota.

c) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota

C. Misi III : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan

IV.Tujuan Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah

Tujuan Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 8 (delapan) indikator sasaran :

Tujuan Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
4.Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	9. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11. Angka harapan lama sekolah
		12. Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan
		13. Capaian Akses Air Minum Layak
		14. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		15. Persentase rumah tangga pengguna listrik

		16. Rasio rumah layak huni
	10. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17. Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten
		18. Indeks SPBE

9.Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan 6 (enam) indikator.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67	67,05	100,07
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,20	79,84	712,86
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	86	81,70	95
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	21	73,61	350,52
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,69	99,99	100,30
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,197	0,2	101,52

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	66,21	66,93	67,05
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	72,61	79,65	79,84
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	73,28	81,51	81,70
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	-	22,53	73,61
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	93,50	93,50	99,99
16	Rasio rumah layak huni	persen	-	0,197	0,2

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	68,50	67,05	97,88
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	13,70	79,84	582,77
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	97	81,70	84,23

14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	33	73,61	223,06
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,94	99,99	100,05
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,2	0,2	100

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
11	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67,05	-	-
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	79,84	-	-
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	81,70	-	
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	73,61	-	
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,99	-	
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,200	-	

11. **Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Presentasi panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Berau data tahun 2022 untuk kewenangan negara 12 persen, provinsi 11 persen dan kabupaten 77 persen Pada tahun 2023 ini Realisasi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap target 67,00% terealisasi 69,97% dengan capaian 104% Adapun data panjang jalan menurut permukaan jalan di kabupaten berau adalah sebagai berikut :

No.	Jenis permukaan jalan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Beton	95,99	113,03	140,47
2	Aspal	452,62	480,83	515,53
3	Telford/Kerikil	201,89	256,77	323,42
4	Tanah belum tembus	927,82	827,69	698,89
	Jumlah	1.678,32	1.678,32	1.678,32

Untuk panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Berau bisa tergambarkan pada tabel dibawah ini :

No.	Kondisi Jalan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Baik	496,13	501,63	542,42
2	Sedang	615,11	621,61	631,82
3	Rusak	484,90	378,11	344,57
4	Rusak Berat	82,19	176,97	159,51
	Jumlah	1.686,08	1.678,32	1.678,32

Kondisi jalan per Kecamatan di Kabupaten Berau Tahun 2023 tergambar pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Total Panjang Jalan	Presentase jalan kondisi mantap
		Baik	Sedang	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat		
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	
1	Tanjung Redeb	72,150	18,680	2,147	1,349	94,326	96,294
2	Sambaliung	92,586	95,550	62,358	25,235	275,729	68,232
3	Gunung Tabur	67,541	81,142	32,358	26,784	207,825	71,542
4	Teluk Bayur	65,939	64,275	22,676	2,550	155,440	83,771
5	Segah	45,155	97,314	31,817	21,554	195,840	72,748
6	Pulau Derawan	15,414	15,557	1,018	26,211	58,200	53,215
7	Maratua	33,652	12,613	0,119	0,070	46,454	99,593
8	Kelay	27,648	57,902	32,590	25,964	144,104	59,367
9	Tabalar	12,636	31,011	31,087	3,805	78,539	55,574
10	Biatan	16,051	33,244	33,674	2,240	85,209	57,852
11	Talisayan	26,832	56,925	54,630	11,614	150,001	55,838
12	Batu Putih	31,249	24,523	22,879	4,297	82,948	67,237
13	Biduk-biduk	35,567	43,082	17,217	7,839	103,705	75,839
	Total Panjang (Km)	**542,42**	**631,818**	**344,57**	**159,512**	**1678,32**	**69,97**

Permasalahan:

1. Terbatasnya anggaran yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan program sehingga perencanaan dan pelaksanaan fisik dilakukan secara bertahap.

Solusi :

1. Perlu adanya anggaran yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan program sehingga perencanaan dan pelaksanaan fisik dilakukan secara bertahap.

11. Indikator Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan
12. Indikator Capaian Akses Air Minum Layak

Cakupan kampung dalam mengakses air bersih merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga hal ini merupakan hal yang penting untuk dijadikan prioritas pembangunan di daerah maupun di pusat

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan			Air yang disalurkan (m3)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kelay	-	-	-	-	-	-
2	Talisayan	1.102	1.134	1.184	224.263	15.096	182.491
3	Tabalar	411	465	499	59.974	3.999	65.782
4	Biduk-biduk	113	113	113	5.936	572	-
5	Pulau Derawan	-	-	-	-	-	-
6	Maratua	-	-	-	-	-	-
7	Sambaliung	3.358	3.859	6.591	835.499	106.894	1.856.124
8	Tanjung Redeb	16.822	17.906	20.199	8.225.022	825.825	8.674.064
9	Gunug Tabur	2.819	2.330	4.332	746.718	73.856	1.105.774
10	Segah	652	683	756	182.141	13.770	109.618
11	Teluk Bayur	2.687	2.106	3.198	1.042.701	75.091	1.217.487
12	Batu Putih (Tembudan)	232	249	273	23.351	2.185	42.183
13	Biatan	171	178	311	9.127	1.776	52.897
	Total Keseluruhan	**28.367**	**29.023**	**37.456**	**11.354.732**	**1.119.064**	**13.306.420**

Sumber : Perumda Air Batiwakkal Tahun 2023

Permasalahan:

1. Luas wilayah tersebar dan topografi yang sangat luas antar kecamatan
2. Keterbatasan sumber daya manusia

Solusi:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air dan dibangunnya unit-unit pengolahan tiap kecamatan

14. **Indikator Presentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	21	73,61	350,52

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hidup	persen	-	22,53	73,61

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hidup	persen	33	73,61	223,06

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hidup	persen	72,32	-	-

Permasalahan:

1. Masih terkendala kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung saluran irigasi

Solusi:

1. Perlu adanya penyedia sarana dan prasarana saluran irigasi

15. **Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Presentase rumaha tangga pengguna listrik masih memakai data tahun yang lama karena untuk kewenangan telah di ambil oleh pihak provinsi Kalimantan timur sehingga program dan kegiatan tidak ada lagi di tingkat pemerintah daerah kabupaten berau. Data yang diperoleh dari UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UP3 berau jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Berau tahun 2023 adalah 82.095.

Pencapaian ini tidak lepas dari bantuan pihak swasta antara lain PT.Berau Coal, PT.Hutan Hijau Mas, PT.Tanjung Buyu Perkasa melalui program CSR. Pengembangan jaringan listrik oleh untuk pembangunan sarana dan prasarana yang nanti pada akhirnya menciptkan masyrakat yang sejahtera. Adapun jumlah pelanggan listrik menurut Kecamatan di Kab.Berau Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

Pelanggan Listrik menurut Kecamatan di Kab.Berau

Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelay	152	153	406	431	436
2	Talisayan	3.083	3.575	3.874	3.943	6.860
3	Tabalar	435	470	809	883	974
4	Biduk-biduk	1.268	1.355	1.462	1.656	1.758
5	Pulau Derawan	1.522	1.610	515	524	553
6	Maratua	-	732	757	770	813
7	Sambaliung	8.644	9.608	7.291	7.421	7.833
8	Tanjung Redeb	22.195	23.123	44.895	45.694	48.223
9	Gunung Tabur	5.912	6.390	3.939	4.009	4.232
10	Segah	1.266	1.530	1.527	1.555	1.641
11	Teluk Bayur	9.442	10.068	5.375	5.471	5.775
12	Batu Putih	583	640	1.746	1.777	1.876
13	Biatan	855	1.038	1.034	1.053	1.111
	Total Keseluruhan	**55.357**	**60.292**	**73.630**	**75.187**	**82.095**

Sumber : UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UP3 Berau

Permasalahan :

Permasalahan dalam penebangan pohon sawit yang dilewati jaringan PLN, dimana warga tidak merelakan phon sawit tersebut ditebang, adanya permintaan ganti ruga. PLN tidak mempunyai anggaran untuk ganti rugi.

Solusi :

Permohonan dukungan dari Bupati, DPRS, dan Stakeholder Pemerintah Daerah dan Stakeholder Perusahaan

16. **Analisis Indikator " Rasio Rumah Layak Huni "**

Hasil pengukuran capaian kinerja Rasio Rumah Layak Huni mencapai 101,52 dan termasuk predikat **"baik sekali".**

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,197	0,200	101,52

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	1,06	0,197	0,200

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,2	0,200	100

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
16	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,200	-	-

16. Indikator Jumlah cadangan pangan pemerintah

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2023 dengan indikator kinerja Rasio rumah layak huni telah mencapai target bahkan melampaui target yaitu 0.200. Hal ini dihasilkan

berkat kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dilaksanakannya program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan yaitu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha. Pada sub kegiatan tersebut dilaksanakan tersebar di 5 Kecamatan dan 15 Kelurahan/Kampung dengan total perbaikan rumah dengan dana APBD sebanyak 166 unit rumah.

Untuk memenuhi Target sesuai Dokumen Recana Strategis Tahun 2021 – 2026, dimana target perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 300 unit setiap tahunnya, untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahn Kalimantan II (Kementrian PUPR) di Samarinda untuk mendapat Quota penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Berau.

Dari hasil koordinasi tersebut Kabupaten Berau mendapat quota program BSPS sebanyak 286 unit rumah yang tersebar pada 5 Kampung/Kelurahan, Sedangkan dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahn Kalimantan II (Kementrian PUPR) Kabupaten Berau mendapat quota program BSPS sebanyak 135 unit rumah yang tersebar pada 10 Kampung/Kelurahan. Sehingga pada tahun 2023 terealisasi perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 587 Unit yang tersebar pada 8 Kecamatan, 30 Kampung / Kelurahan. Dengan jumlah tersebut maka target dapat terlampaui dan dapat menutupi kekurangan target ditahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum sesuai standar kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Kurangnya Sarana Prasarana yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Belum tertatanya sistem pengelolaan basis data dan aset dengan baik;
4. Terbatasnya anggaran yang disediaan dalam mendukung pelaksanaan program baik dalam perencanaan program sehingga perencanaan dilakukan secara bertahap maupun dalam pelaksanaan program.

Solusi :

1. Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program-program yang telah ditetapkan baik program utama maupun program penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas;
2. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana secara optimal. Pemanfaatan dilaksanakan efektif dan efisien walaupun SDM yang tersedia masih terbatas dengan kemampuan yang terbatas, namun terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan.
3. Memanfaatkan anggaran yang disediakan secara efektif dengan cara penyusunan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
4. Menyusun pedoman penilaian resiko Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan melakukan Sistem pengendalian intern Pemerintah secara sederhana.

17. Sasaran "Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan 2 (dua) indikator rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten dan indeks SPBE.

Rasio konektivitas antar wilayah kabupaten yang di dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada saat penginputan target dalam perencanaan ada

kesalahan inputan data yaitu sebesar 60 yang seharusnya target 0,6. Sedangkan indikator SPBE ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,6	0,75	125
18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,02	144,29

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,39	0.56	0,75
18	Indeks SPBE	indeks	-	1,97	2,02

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,75	0,75	100
18	Indeks SPBE	indeks	1,6	2,02	126,25

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
11	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,75	-	-
12	Indeks SPBE	persen	2,02	-	-

17. **Sasaran** "Analisis rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten"

Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten Berau mempunyai target 0,6 pada tahun 2023 dan terealisasi 0,75 dengan tingkat capaian sebesar 107,14%. Konektivitas antar wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang mantap dan berkualitas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Permasalahan :

1. Masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau transportasi umum/angkutan umum perintis.
2. Belum adanya perencanaan kebutuhan trayek transprtasi umum yang baik.

Solusi :

1. Bidang/Pelaksana Teknis harus segera membuat Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Sistem Transportasi Lokal.

18. **Sasaran** "Indeks SPBE'

Capaian Indeks SPBE di Kabupaten Berau tahun 2023 dari target 1,4 dimana realisasinya 2,02 dengan capaian 126,25 hal ini telah melebihi dari target pada dokumen RPJMD. Indeks SPBE merupakan salah indikator dalam mengukur pelayanan melalui transformasi digital. Namun, Target 1,4 itu nilai yang sangat kurang dari standar pusat, maka dari itu

perlu adanya revisi Renstra. Untuk mencapai indeks spbe yang kategori cukup, baik, dan sangat baik kita harus memenuhi capaian 47 Indikator.

Permasalahan :

1. Kabupaten Berau belum semuanya menyusun 6 domain, masih ada proses bisnis yg belum disusunBelum optimal penggunaan IT yang terintegrasi.
2. Manajemen SPBE belum di susun.
3. Audit TIK belum pernah dilaksanakan.
4. Antar opd belum semua terintegrasi.

Solusi :

1. Membangun dan mendorong integrasi berbasis digital dalam pelaksanaan pembangunan berbasis IT.
2. Perlu dukungan dan komitmen pimpinan
3. Dari semua permasalahan harus semuanya di tuntaskan sehingga bisa mencapai indeks SPBE yg maksimal

V.Tujuan Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Tujuan Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 3 (tiga) indikator sasaran :

Tujuan Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
5. Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup	19. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19. Hasil pengukuran indkes kualitas air
		20. Hasil pengukuran indeks kualitas udara
		21. Indeks kualitas tutupan lahan

19. Sasaran "Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan 3 (tiga) indikator.

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,49	53,33	94,41
20	Hasil pengukuran indkes kualitas udara	Indeks	86,17	85,17	98,84
21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,799	93,76	104,41

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,09	53,48	53,33
20	Hasil pengukuran indkes kualitas udara	Indeks	85,32	83,76	85,17
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	94,64	94,64	93,76

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,69	53,33	94,07
20	Hasil pengukuran indkes kualitas udara	Indeks	86,47	85,17	98,50
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	89,814	93,76	104,40

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	53,33	-	-
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	85,17	-	-
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	93,76		

19. Analisa Hasil Pengukuran Indeks Kalitas Air
20. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
21. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pada capaian kinerja pada tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan target RPJMD dan Renstra dari 3 indikator, yang tidak mencapai target yaitu 2 indikator dan 1 indikator mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target yaitu hasil pengukuran indeks kualitas air dan hasil pengukuran indeks kualitas udara tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 53,33 (IKA) dan 85,17 (IKU) dari target 56,49 (IKA) dan 86,17

(IKU). Tidak tercapainya indeks kualitas air dikarenakan tingginya curah hujan, tidak adanya serapan untuk air hujan, alih fungsi lahan sehingga menyebabkan parameter pada perhitungan indeks kualitas air menjadi meningkat seperti kekeruhan, fecal coli, BOD, dan COD. Sedangkan tidak tercapainya target indeks kualitas udara disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya kegiatan yang menimbulkan dampak emisi seperti perbaikan infrastruktur, dan kurangnya lahan untuk penghijauan. Dengan tidak tercapainya IKA dan IKU, maka hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup juga tidak mencapai target yang ditetapkan.

Indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 93,76 dari 89,799, hal ini disebabkan adanya penambahan tutupan lahan seluas 20 Ha yang dilaksanakan di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk di areal penggunaan lain (APL) oleh KPH Berau Pantai. Walaupun capaian Indek Tutupan Lahan melebihi target, namun masih ada emisi gas karbon yang perlu diturunkan, dan pada tahun 2023 tercatat 314.734 CO2eq, dimana hal ini disebabkan terjadinya fenomena alam elnino sehingga mengakibatkan kebakaran di beberapa titik, peningkatan jumlah kendaraan juga menjadi penyumbang emisi gas karbon.

Permasalahan :

1. Keterbatasan anggaran
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Adanya Laboratorium lingkungan hidup yang belum terakreditasi

Solusi :

1. Perlu adanya dukungan anggaran guna membangun sarana dan prasarana.
2. Perlu dukungan Sumber Daya Manusia.
3. Perlu adanya komitmen yang baik semua unsur OPD untuk menyelesaikan pekerjaan, serta kerjasama yang baik antar unsur OPD di DLHK.

Misi IV : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel.

VI Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi

Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran Prioritas Pembangunan dengan 4 (empat) indikator sasaran :

Tujuan Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, Transparan, Profesional Dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi	12.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22. Opini BPK
		21. Nilai/Predikat AKIP
		22. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab.Berau
	13. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25. Survei Kepuasan Masyarakat

12. Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah"

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	67	62,40	93,13
24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi	3,1964 (sedang)	93,74

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	WTP*
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	63,74	61,62	62,40
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Sangat Tinggi*	Sangat Tinggi*	Sedang

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
22	Opini BPK	opini	WTP	WTP*	100
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	72	62,4	86,67

24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab.Berau	Status	Tinggi	3,1964	93,74

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
22	Opini BPK	opini	WTP*	-	-
23	Kategori SAKIP Kab.Berau	Nilai/Kategori	62,40	-	-
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	3,1964	-	-

22. Analisis Indikator Opini BPK

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

Hasil pengukuran capaian indicator kinerja mencapai 100 % dan termasuk predikat **"baik".**

Sebagai bagian dari proses pemerikasaan, aspek pengendalian internal juga bagian yang terpenting dalam informasi birokrasi dan akuntabilitas. Hal ini diperlukan untuk peningkatan kinerja dalam membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi yang sesuai arahan dalam tata pemerintahan yang baik.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) WDP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecualiuntuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar (Adversed Opinion) Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan. (Sumber : bpk.go.id)

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terjadi pencapaian target 100% dari yang ditargetkan dan telah memenuhi target dari RPJMD Kabupaten Berau dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Hal ini menunjukan pencapaian yang baik dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk tahun 2023 masih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Kalimantan Timur. Dalam mewujudkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperlukan kesungguhan dari seluruh entitas akuntansi yaitu semua Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan daerah sejak dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta dalam dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Dari tabel diatas bahwa terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi pemerintah Kabupaten Berau berhasil meraih predikat penilaian dari audit BPK dikategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini menunjukkan pencapaian yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan dan pelaporan serta aset pemerintah Kabupaten Berau. Ada beberapa faktor keberhasilan sehingga mendapatkan predikat WTP yaitu :

1. Kesesuaian antara target dengan realisasi baik dari sisi keuangan maupun output kegiatan perangkat daerah.
2. Penatausahaan keuangan dan aset perangkat daerah dilakukan secara tertib, benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sarana dan prasarana pendukung kerja memadai. Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan keuangan dan aset pada perangkat daerah cukup memadai baik kuantitas maupun kualitas.
4. Pelaporan keuangan dan aset perangkat daerah disusun relatif tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya pengelolaan aset tetap pemerintah Kabupaten Berau .
2. Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan

Solusi :

1. Meningkatnya manajemen perencanaan dan pengelolaan aset daerah
2. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
3. Memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan
4. Menindaklanjuti hasil rekomendasi oleh BPK.

23. Analisis Indikator Kategori SAKIP Kab.Berau

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban setiap daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan atas anggaran yang telah digunakan. Sasaran kualitas akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel,transparan menuju good governance.untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada asas keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur merupakan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menerangkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada atasannya atau pemberi amanah dan stakeholder lainnya yang diwujudkan dalam sebuah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan tentang manajemen kinerja sebuah Organisasi Perangkat Daerah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabiltas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator sasaran Nilai/Predikat AKIP memperoleh predikat B atau dengan nilai 62,40 yang artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2 / unit kerja.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

Perubahan Bobot Penilaian :

No	Permenpan Nomor 12 Tahun 2015		Permenpan Nomor 88 Tahun 2021	
	Aspek	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%	**Perencanaan Kinerja**	**30**
2	Pengukuran Kinerja	25%	**Pengukuran Kinerja**	**30**
3	Pelaporan Kinerja	15%	**Pelaporan Kinerja**	**15**
4	Evaluasi Kinerja	10%	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25**
5	Capaian Kinerja	20%		

Kategori Nilai :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangar memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis,adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	(Nilai >80-90)	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator).
3	BB	(Nilai >70-80)	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator
4	B	(Nilai>60-70)	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

			Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	(Nilai >50-60)	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	(Nilai>30-50)	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	(Nilai >0-30)	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada tahun 2023 evaluasi SAKIP Pemerintah berpedoman pada peraturan Permenapan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini menitikberatkan pada ***"perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja".*** Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,40 dengan predikat "B", yaitu implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik",** yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Per Komponen Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2019-2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	21,28	21,43	21,52	22,20
2	Pengukuran Kinerja	25	15,84	15,98	15,53	17,66
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,22	10,50	9,96
4	Evaluasi Internal	10	5,51	5,66	5,71	11,80
5	Capaian Kinerja	20	10,18	10,21	10,48	-
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**62,86**	**63,50**	**63,74**	**61,62**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**	**B**

Hasil Evaluasi Per Komponen Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	**30**	**22,42**
2	Pengukuran Kinerja	**30**	**17,94**
3	Pelaporan Kinerja	**15**	**10,06**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**25**	**11,98**
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**62,40**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Permasalahan tidak tercapai nilai/predikat Laporan Kinerja :

- Untuk tingkat kabupaten, sebagian besar rumusan kinerja sasaran dan indikator belum memenuhi kriteria kualitas yang

baik, terkait dengan karakteristik terukur, relevan, orientasi hasil, dan tepat level pengampu kinerjanya;

- Sebagian sasaran kinerja Perangkat Daerah belum dapat menggambarkan isu stratefis atau alasan utama eksistensi Perangkat Daerah tersebut;
- Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja sudah secara elektronik melalui Aplikasi e-sakip yang dapat diakses melalui esakip-berau.com namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Hal ini terlihat masih ditemukan sebagaian besar Perangkat Daerah yang belum secara aktif dan update dalam pengukuran capaian kinerja dan belum terlihat adanya feedback perbaikan dari pimpinan terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai baik di level Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
- Pemerintah Daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebgai dasar pemberian *reward* and *punishment*;
- Laporan kinerja telah memuat informasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam mencapai kinerja, namun belum cukup komprehensif dan mendetail sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanannya;
- Laporan Kinerja telah memuat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, namun perlu diperhatikan kembali keandalan

perhitungan data yang disajikan. Selain itu, belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki;

- Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Berau sudah disertai dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan tingkat efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak dan beberapa perangkat daerah yang lain memiliki informasi yang lebih lengkap seperti menginformasikan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja.
- Berdasarkan Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pelaksananan evaluasi internal belum disertai engan pedoman pelaksanaan sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Monitoring secara berkala atas temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada OPD belum dilakukan secara berkala.

Solusi :

1. Pimpinan Perangkat Daerah harus berperan langsung dalam proses Pengintegrasian mulai dari Perencanaan, Keuangan, Pelaporan sampai dengan evaluasi (SAKIP).
2. Komitmen untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung program priortas dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
3. Mengevaluasi Program Kegiatan yang mendukung sasaran RPJMD sehingga nanti diharapkan adanya keselaran antara sasaran RPJMD dengan Program dan kegiatan dalam pencapaian Kinerja Kepala Daerah.
4. Melakukan Monev pencapaian kinerja secara berkala dan menindaklanjuti atas hasil evaluasi/rekomendasi baik dari Itwilkab, Itwilprov dan Kementerian PAN & RB.
5. Perlu ada diklat atau bimtek untuk meningkatkan SDM ASN yang membidangi SAKIP baik Kabupaten maupun PD.
6. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja baik di level Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk memastikan ketepatan rumusan tujuan dan sasaran strategis agar berorientasi hasil/*outcome* atau menggambarkan kinerja yang seharusnya dan mampu menjawab semua isu strategis yang dihadapi, sehingga keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis dapat memberikan manfaat yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat;
7. Menyempurnakan dan melengkapi indikator kinerja tujuan dan sasaran yang lebih spesifik, relevan, terukur, dan cukup kepada seluruh Perangkat Daerah serta disertai dengan target-target kinerja yang memadai. Sehingga, indikator kinerja yang telah ditetapkan mampu menunjukkan ketepatan dan keandalan dari ketercapaian kinerja;
8. Menyusun pohon kinerja baik level Kabupaten dan Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan pohon kinerja yang tertuan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 sehingga terlihat hubungan sebab-akibat dan penjabaran kinerja;

9. Melengkapi IKU denggan definisi operasional, formasi perhitungan, dan sumber daya. Selain itu, melakukan pengukuran kinerja (khususnya pada Perjanjian Kinerja) secara berkala bukan hanya melakukan monitoring capaian kegiatan dan penyerapan anggaran;
10. Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (feedback) bagi perbaikan pencacapaian kinerja untuk kedepan;
11. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi atas capaian kinerja terutama pada analisis deskriptif untuk mengukur efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan kondisi benchmark dari Kabupaten/Kota lain serta Provinsi Kalimantan Timur, dan apabila memungkinkan dengan membandingkan capaian nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis;
12. Melakukan evaluasi kinerja internal kepada seluruh Perangkat Daerah dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kementerian PANRB dan Perangkat Daerah bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perbaikan AKIP secara berkelanjutan pada setiap Perangkat Daerah;
13. Menyusun pedoman pelaksanaan evalausi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

24. Analisis Indikator Status Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau berdasarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menunjukkan capaian Sedang dengan skor 3,1964. Hasil evaluasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provini dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Capaian tahun 2023, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu Satus Kinerja Tinggi (Skor 3,41). Namun capaian di tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumya, dimana pada tahun 2022 capaian Status Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau adalah Rendah (Skor 2,81).

Permasalahan :

1. Perubahan Regulasi Peraturan perundang undangan yang mengatur indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. perencanaan dan penganggaran belum memperhatikan IKK urusan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana amanat Peraturan perundang-undangan
3. kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan data IKK Penyelenggraan Urusan pemerintahan
4. kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pelaksanaan IKK urusan pemerintahan daerah
5. belum optimalnya capaian hasil dan keluaran penyelenggraan pemerintahan daerah karena belum teranggarkan secara baik dan optimal.

Solusi

1. Melaksanakan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur.
2. Mengintegrasikan IKK dalam DOKRENDA.
3. Penguatan peran Tim dan Perkuat Koordinasi dalam Pelaksanaan Urusan.

Sasaran 13"Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah"

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	92,16	92,16	100

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	84,56	90,12	92,16

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	98	92,16	94,04

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	92,16	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat kategori survei kepuasan masyarakat Kabupaten Berau untuk tahun 2023 mencapai target yaitu 92,16. Dengan kategori A. Survei Kepuasan masyarakat tahun 2023 mengalami peningkatan 2,04 dari tahun 2022 yaitu 90,12 dengan kategori A. Jika dilihat dari capaian kinerja terkait indikator survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Berau menujukkan hal yang positif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik, yang mana masuk dalam kategori A.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai abdi masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik.

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- Perlu diketahui peraturan-peraturan yang mendasari tentang pelaksanaan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :
  1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat.
  2. Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Selain itu ada perbedaan unsur pelayanan yang dimuat dalam setiap peraturan sehingga terjadi perubahan pengukuran nilai rata-rata dan ini sangat berpengaruh terhadap laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan Peraturan Kementerian PAN & RB terkait pedoman SKM

KEP/25/M.PAN/2/2004	PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014	PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
1. Prosedur pelayanan	1. Persyaratan	1. Persayaratan
2. Persyaratan pelayanan	2. Prosedur	2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Kejelasan petugas pelayanan	3. Waktu Pelayanan	3. Waktu Penyelesaian
4. Kedisiplinan petugas pelayanan	4. Biaya/Tarif	4. Biaya/Tarif
5. Tanggung jawab petugas pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kemampuan petugas	6. Kompetensi	6. Kompetensi

pelayanan	Pelaksana	Pelaksana
7. Kecepatan pelayanan	7. Perilaku Pelaksana	7. Prilaku Pelaksana
8. Keadilan mendapatkan pelayanan	8. Maklumat Pelayanan	8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Kesopanan dan keramahan petugas	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	9. Saran dan Prasarana
10. Kewajaran biaya pelayanan		
11. Kepastian biaya pelayanan		
12. Kepastian jadwal pelayanan		
13. Kenyamanan lingkungan		
14. Keamanan pelayanan		

Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik

3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 14 Tahun 2017

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan disetiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat memuat dengan memuat 14 unsur pelayanan tetapi belum mengacu pada

- UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan.
- Ruang lingkup SKM belum selaras dengan Komponen Standar Pelayanan
- Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 81,26 – 100.00.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat dengan memuat 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan tetapi dalam Peraturan ini belum :
   - Mengatur teknis operasional pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
   - Metode pengolahan data hasil survei belum ditentukan sehingga tidak ada keseragaman hasil survei
   - Penentuan jumlah sample responden belum diatur
   - Hasil survei belum dipublikasikan
   - Skor kepuasan masyarakat dalam kuantitatif dapat dikonversikan dalam bentuk kualitatif (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Buruk)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 Unsur Pelayanan. Dalam Peraturan ini telah diatur antara lain
   - Unsur Pelayanan ada memuat Saran dan Prasarana
   - Penetapan responden menggunakan sample Morgan dan Krejcie
   - Analisa Tindak Lanjut Hasil Survei dan rencana tindak lanjut
   - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus di Publikasi

- Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 88,31 – 100.00 karena dibanding dengan interval peraturan sebelumnya hanya mencapai 81,26 – 100.00.

Permasalahan :

1. Belum menjadi prioritas penganggaran pada Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik.
2. Kurangnya respon terhadap penyampaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Perangkat Daerah khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Hasil evaluasi SKM belum sepenuhnya menjadi perbaikan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Beberapa Perangkat Daerah masih belum paham tata cara penyampaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan tabel Morgan dan Krejcie Sebagai penentu populasi dan masih menggunakan Unsur Pelayanan 14 (empat belas) dalam menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Solusi :

1. Monitoring dan Evaluasi ke Perangkat Daerah
2. Mengetahui kelemahan dan kekuatan penyelenggara pelayanan publik serta capaian kinerja secara periodik.
3. Perlu pembelajaran kepada Perangkat Daerah yang belum memahami tata cara penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2018.

B. Realisasi Anggaran

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait efesiensi anggaran dengan capaian kinerja yang telah di targetkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023.

Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tingkat Efisiensi	OPD Penanggungjawab
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		
1	Harapan lama sekolah	93,49	93,27	0,22	Dinas Pendidikan
2	Rata-rata lama sekolah	97,15	98,4	-1,25	
3	Angka harapan hidup	101,48	81	20,48	Dinas Kesehatan
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	222,71	89	133,71	
5	Tingkat Pengangguran terbuka	95,34	79,58	15,76	Disnakertrans
6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	89,42	89,2	0,22	Dinas Sosial
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	34,66	55,06	-20,4	Diskoperindag
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	139,39	87,76	51,63	Disbudpar
9	Kontribusi Sektor Pertanian,	94,94	86,37	8,57	Dinas Perkebunan
					Dinas perikanan
					DTPHP
10	Score pola pangan harapan	105,98	72,59	33,39	Dinas Pangan

11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	100,07	92,92	7,15	DPUPR
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	712,86	94,7	618,16	
13	Capaian Akses Air Minum Layak	95	94,7	0,3	
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	350,52	96,31	254,21	
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100,30	-	-	
16	Rasio rumah layak huni	101,52	98,28	3,24	Disperkim
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	125	97,32	27,68	Dishub
18	Indeks SPBE	144,29	73,65	70,64	Diskominfo
19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	94,41	91,22	3,19	DLHK
20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	98,84	91,22	7,62	
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	104,41	83,49	20,92	
22	Opini BPK	100	92,44	7,56	BPKAD
23	Nilai/Predikat AKIP	93,13	86,47	6,66	Bagian Organisasi
24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab.Berau	93,74 (Sedang)	89,36	4,38	Bagian Tapem
25	Survei Kepuasan Masyarakat	100	86,47	13,53	Bagian Organisasi

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau secara keseluruhan tercapai secara maksimal dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Pada tahun 2023 target pendapatan daerah sebesar Rp. 4.377.445.743.906,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.700.904.175.374,78.

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 259.170.865.751,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 287.131.921.505,78 atau terealisasi sebesar 107,39 %. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer anggaran sebesar Rp. 4.065.914.334.995,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.406.411.710.669,00 atau terealisasi sebesar 108,37 persen.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah masih bersifat sementara karena laporan realisasi masih dalam proses. Untuk laporan dalam bentuk tabel terlampir.

Anggaran dan Realisasi Sasaran dan Program

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel.3.10

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggaran
1	**Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP**	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	**Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT**	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb,Kec. Teluk Bayur, Kec.Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	**Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis**	3.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		4.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		5.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	**Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu**	6.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

5	**Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal**	7.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		8.Program Hubungan Industrial	
6	**Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung**	9.Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	**Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota**	10.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		11.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		12.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	**Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu**	13.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		14.Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	**Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)**	15. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		16.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		17.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec.Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	**Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh**	18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR

	Kampung	19.Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	**Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat**	20.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		21.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		22.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	**Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19**	23.Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	**Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain- lain)**	24.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	**Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) SertaMewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi**	25. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		26.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		27.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		28.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

15	**Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata**	29.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		30.Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		31.Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		32.Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub

Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam sebagai berikut :

Tabel 3.11

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN		PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Pagu	Realisasi	%	
MISI KE 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN BERBUDI LUHUR							
TUJUAN KE 1 Mewujudkan Masyarakat Berau yan Berdaya Saing							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	218.615.508.977	203.903.754.747	93,27	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.209.122.000	5.125.660.800	98,40	Dinas Pendidikan
Rata-rata Capaian							
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.841.283.424	76.002.976.489	77,68	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.190.634.000	1.882.060.504	85,91	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	86.598.000	53.319.400	61,57	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	361.450.000	249.942.128	69,14	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.198.524.400	9.316.591.327	91,35	Rsud Abdul Rivai
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.149.976.200	2.651.535.800	84,18	Rsud Abdul Rivai

		9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.877.320.072	2.352.276.602	81,75	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian							
MISI KE 2 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN OPTIMALISASI SEKTOR HILIR SUMBER DAYAALAM DAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS YANG BERBASIS KERAKYATAN DENGAN PERLUASAN LAPANGANKERJA DAN PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL							
Tujuan Ke 2 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Yang Mantap Dan Berdaya Saing							
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.011.987.800	1.419.913.416	47,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		11	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.069.922.400	1.011.215.867	94,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12	Program Hubungan Industrial	1.307.085.600	1.269.178.668	97,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rata-rata Capaian							
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Program Pemberdayaan Sosial	1.277.565.000	1.253.846.957	98,14	Dinas Sosial
		14	Program Rehabilitasi Sosial	5.831.288.000	5.610.759.152	96,22	Dinas Sosial
		15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.850.000.000	3.543.898.000	73,07	Dinas Sosial
		16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	3.162.488.000	3.054.952.371	96,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	54.094.553.525	46.602.167.250	89,36	Sekretariat Daerah Tapem dan Kesra
		18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16.028.518.453	15.452.027.400	96.00	Kecamatan Tanjung Redeb
Tujuan Ke 3 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan							
Rata-rata Capaian							
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.748.999.600	347.971.416	19,90	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		20	Program Pengembangan UMKM	5.144.999.000	1.243.835.255	24,18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	127.853.000	111.458.137	87,18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.367.265.200	8.831.276.775	94,28	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70.000.000	41.025.960	58,61	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	813.425.600	376.200.312	46,25	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata Capaian							
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis	25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	28.422.363.696	26.254.567.626	92,37	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	sustainable tourism	26	Program Pemasaran Pariwisata	3.928.123.800	3.731.890.155	95,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	600.531.000	534.489.128	89,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		28	Program Pengembangan Kebudayaan	5.760.792.600	3.614.184.914	62,74	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rata-rata Capaian							
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.570.400.930	2.258.679.367	87.87	Dinas Perkebunan
		30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	983.685.000	965.753.806	98.18	Dinas Perkebunan
		31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.973.361.300	2.852.864.604	95.95	Dinas Perkebunan
		32	Program Perizinan Usaha Pertanian	742.427.000	626.980.994	84.45	Dinas Perkebunan
		33	Program Penyuluhan Pertanian	1.604.036.500	1.576.268.502	97.17	Dinas Perkebunan
		34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.731.174.820	9.349.551.444	79,70	Dinas Pertanian dan Peternakan
		35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.171.315.000	1.071.168.911	49,33	Dinas Pertanian dan Peternakan
		36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	8.986.999.600	6.717.324.522	74,74	Dinas Pertanian dan Peternakan
		37	Program Perizinan Usaha Pertanian	379.495.000	303.650.780	80,01	Dinas Pertanian dan Peternakan
		38	Program Penyuluhan Pertanian	1.743.080.000	1.506.583.550	86,43	Dinas Pertanian dan Peternakan
		39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	17.166.804.200	14.734.074.184	85,83	Dinas Perikanan
		40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.560.408.400	2.908.489.123	81,69	Dinas Perikanan
		41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.619.486.000	2.502.802.734	95,55	Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian							
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	615.462.000	394.791.670	64,15	Dinas Pangan
		43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.419.311.000	2.726.916.984	79,75	Dinas Pangan
		44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	380.968.000	281.477.150	73,88	Dinas Pangan
MISI KE 3 MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG BERKUALITAS, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
Tujuan 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah							
9	Meningkatnya Kualitas	45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	295.313.624.950	253.801.919.637	85,94	DPUPR

	Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	92.416.577.499	87.519.970.937	94,70	DPUPR
		47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	345.862.000.000	326.468.789.579	94,39	DPUPR
		48	Program Penataan Bangunan Gedung	247.254.315.797	206.593.892.620	83,56	DPUPR
		49	Program Penyelenggaraan Jalan	1.276.061.227.686	1.185.689.861.111	92,92	DPUPR
		50	Program Pengembangan Perumahan	470.000.000	458.465.452	97,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		51	Program Kawasan Permukiman	1.371.819.000	1.338.464.561	97,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		52	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.889.000.000	3.879.173.722	99,75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	37.746.000.000	37.329.735.475	98,27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	18.780.000.000	8.760.531.233	46,65	Dinas Pertanahan
Rata-rata Capaian							
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	55	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	41.429.999.100	40.317.838.933	97,32	Dinas Perhubungan
		56	Program Pengelolaan Pelayaran	21.539.999.208	19.618.022.157	91,08	Dinas Perhubungan
		57	Program Aplikasi Informatika	12.577.728.336	9.263.817.160	87,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 5 Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup							
Rata-rata Capaian							
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	58	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.363.654.000	1.086.037.676	79,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	298.198.000	255.825.150	85,79	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		60	Program Pengelolaan Persampahan	15.880.794.980	14.912.841.262	93,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Rata-rata Capaian							
MISI KE 4 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL							
Tujuan 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi							
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	61	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	465.060.048.164	450.015.252.085	96,76	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.300.349.000	8.195.083.673	88,12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.684.707.360	5.001.846.082	87,99	Badan Pendapatan Daerah
		64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	651.139.000,00	629.081.496,00	96,61	Badan Pendapatan Daerah

		65	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.997.575.000	3.698.688.937	92,52	Badan Perencanaan,Penelitiaan dan Pengembangan
		66	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.467.357.450	4.115.436.982	75,27	Badan Perencanaan,Penelitiaan dan Pengembangan
		67	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.670.736.300	30.825.000	0,84	Inspektorat
		68	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.919.165.000	14.197.655	0,84	Inspektorat
		69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	30.815.738.464	26.983.301.405	0,74	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
		70	Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.024.109.400	1.750.184.564	86,47	Sekretariat Daerah
		71	Program Penataan Desa	460.838.000	295.348.204	64,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata-rata Capaian							
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	72	Program Kepegawaian Daerah	4.727.461.680	4.140.186.292	87,58	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.297.742.000	4.721.924.642	74,98	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		74	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	183.003.000	104.319.649	57.00	Kecamatan Tanjung Redeb
		75	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000	6.939.000	19.00	Kecamatan Tanjung Redeb
		76	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.864.867.000	7.129.274.473	90,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata-rata Capaian							

Bab IV
Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Berau ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. **Misi Pertama;** yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (indikator) indikator kinerja dengan capaiaan presentase rata-rata sebesar 128,71 persen yang telah dicapai dalam tahun 2023. Dengan capaian kinerja memperoleh nilai/predikat sangat baik.
2. **Misi Kedua;** yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal dengan menetapkan 2 (dua) Tujuan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023. Dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik. Dengan nilai capaian presentase rata-rata adalah 93,29 persen.
3. **Misi Ketiga ;** yaitu Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan telah ditetapkan 2 (dua) tujuan 3 (tiga) sasaran startegis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian presentase rata-rata adalah 184,30 persen.

4. **Misi Keempat ;** yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel telah ditetapkan 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran startegis dan 4 (empat) indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan nilai capaian kinerja memperoleh nilai/predikat baik, dengan capaian presentase rata-rata adalah 96,7 persen. Akan tetapi ada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang di inginkan dengan capaian rata – rata 100%, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah kabupaten berau.

Adapun beberapa indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% pada tahun-tahun berikutnya akan diupayakan perbaikan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau.

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis.

LAMPIRAN

- RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
- LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur						
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing						
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,29	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Tahun	72,38	Dinas Kesehatan
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	44,9	
MISI II : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber dayaalam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangankerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal						
Tujuan 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing						
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	4,73	Disnakertrans
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	5,01	Dinas Sosial
Tujuan 3: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan						
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	Persen	3	Diskoperindag
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,99	Disbudpar
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	Dinas Pertanian dan Peternakan ,Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	Dinas Pangan

Misi III : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan						
Tujuan 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah						
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	67	DPUPR
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Persen	11,2	
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	86	
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	21	
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,69	
		16	Rasio rumah layak huni	Persen	0,197	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	Rasio	0,6	Dinas Perhubungan
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	Kominfo
Tujuan 5. Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup						
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indkes	56,49	DLHK
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indkes	86,17	
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,799	
Misi IV : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel						
Tujuan 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi						
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	B (67)	Bagian Organisasi
		24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/Nilai	A (92,16)	Bagian Organisasi

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur						
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing						
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,29	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Tahun	72,38	Dinas Kesehatan
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	44,9	
MISI II : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber dayaalam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangankerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal						
Tujuan 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing						
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	4,73	Disnakertrans
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	5,01	Dinas Sosial
Tujuan 3: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan						
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	Persen	3	Diskoperindag
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,99	Disbudpar
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	Dinas Pertanian dan Peternakan ,Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	Dinas Pangan

Misi III : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan						
Tujuan 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah						
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	67	DPUPR
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Persen	11,2	
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	86	
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	21	
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,69	
		16	Rasio rumah layak huni	Persen	0,197	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	Rasio	0,6	Dinas Perhubungan
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	Kominfo
Tujuan 5. Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup						
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indkes	56,49	DLHK
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indkes	86,17	
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,799	
Misi IV : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel						
Tujuan 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi						
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	B (67)	Bagian Organisasi
		24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/Nilai	A (92,16)	Bagian Organisasi

REALISASI PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PERANGKAT DAERAH
MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur								
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing								
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,29	13,36	93,49	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	9,56	97,15	
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Tahun	72,38	73,45	101,48	Dinas Kesehatan
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	44,9	100	222,72	
MISI II : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber dayaalam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangankerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal								
Tujuan 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing								
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	4,73	4,95	95,34	Disnakertrans
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	5,01	5,54	89,42	Dinas Sosial
Tujuan 3: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan								
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	Persen	3	1,04	34,66	Diskoperindag
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,99	1,38	139,39	Disbudpar
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,86	11,26	94,94	Dinas Pertanian dan Peternakan ,Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	82	86,9	105,98	Dinas Pangan

Misi III : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan								
Tujuan 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah								
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	67	67,05	100,07	DPUPR
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Persen	11,2	79,84	712,86	
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	86	81,7	95	
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	21	73,61	350,52	
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,69	99,99	100.30	
		16	Rasio rumah layak huni	Persen	0,197	0,200	101,52	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	Rasio	0,6	0,75	125	Dinas Perhubungan
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,02	144,29	Kominfo
Tujuan 5. Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup								
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indkes	56,49	53,33	94,41	DLHK
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indkes	86,17	85,17	98,84	
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,799	93,76	104,41	
Misi IV : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel								
Tujuan 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi								
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*	BPKAD
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	B (67)	B (62,4)	93,13	Bagian Organisasi
		24	Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi	Sedang	93,74	Bagian Tata Pemerintahan
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/Nilai	A (92,16)	A (92,16)	100	Bagian Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 *(Unaudited)*

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2022	REALISASI 2022
1	2		3		5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN	5.1.1	4.377.445.743.906,00	4.700.904.175.374,78	107,39	3.169.396.847.335,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	259.170.865.751,00	287.131.921.505,78	110,79	299.529.844.588,90
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	90.000.000.000,00	93.382.456.473,00	103,76	101.978.007.723,50
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.465.689.150,00	14.933.984.444,00	130,25	10.477.919.521,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	17.619.185.180,00	16.119.182.280,09	91,49	19.370.432.054,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	140.085.991.421,00	162.696.298.308,69	116,14	167.703.485.289,95
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		259.170.865.751,00	287.131.921.505,78	110,79	299.529.844.588,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	4.065.914.334.955,00	4.406.411.710.669,00	108,37	2.869.867.002.747,00
4.2.01.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	3.233.006.863.800,00	3.579.099.939.714,00	110,70	2.350.774.212.350,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	2.476.224.886.800,00	2.846.123.582.480,00	114,94	1.659.023.908.668,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	566.612.593.000,00	565.773.403.521,00	99,85	545.240.741.789,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	61.943.730.000,00	52.763.540.954,00	85,18	48.847.810.234,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	128.225.654.000,00	114.439.412.759,00	89,25	97.661.751.659,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		3.233.006.863.800,00	3.579.099.939.714,00	110,70	2.350.774.212.350,00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00	87.834.603.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.2.4	93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00	87.834.603.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00	87.834.603.000,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	739.230.082.155,00	733.634.381.955,00	99,24	431.258.187.397,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	514.717.582.155,00	509.121.881.955,00	98,91	336.097.187.397,00
4.2.02.02	Bantuan keuangan	5.1.1.2.3.2	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	100,00	95.161.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		739.230.082.155,00	733.634.381.955,00	99,24	431.258.187.397,00
	Total Pendapatan Transfer		4.065.914.334.955,00	4.406.411.710.669,00	108,37	2.869.867.002.747,00
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	52.360.543.200,00	7.360.543.200,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah		45.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya		7.360.543.200,00	7.360.543.200,00	100,00	0,00
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah		52.360.543.200,00	7.360.543.200,00	14,06	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		4.377.445.743.906,00	4.700.904.175.374,78	107,39	3.169.396.847.335,90
5	BELANJA	5.1.2	5.177.879.482.000,00	4.608.120.868.464,26	89,00	2.906.895.452.391,91
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.136.652.416.585,00	1.818.795.262.619,26	85,12	1.574.647.666.072,91
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	950.561.904.928,00	812.677.295.576,65	85,49	788.533.936.225,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	993.395.407.456,00	834.570.312.408,61	84,01	698.410.047.416,22
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	183.280.304.201,00	163.011.244.933,00	88,94	80.981.838.137,07
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	9.414.800.000,00	8.536.409.701,00	90,67	6.721.844.294,00
	Jumlah Belanja operasi		2.136.652.416.585,00	1.818.795.262.619,26	85,12	1.574.647.666.072,91
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	2.583.507.416.051,00	2.345.617.541.442,00	90,79	1.028.531.224.206,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	17.447.199.000,00	7.825.488.693,00	44,85	192.821.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	187.524.561.369,00	172.966.458.500,00	92,24	119.216.483.894,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	359.913.853.309,00	307.876.754.279,00	85,54	155.604.600.350,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	2.009.310.327.282,00	1.848.412.488.655,00	91,99	749.802.632.312,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.311.475.091,00	8.536.351.315,00	91,68	3.714.686.650,00
	Jumlah Belanja Modal		2.583.507.416.051,00	2.345.617.541.442,00	90,79	1.028.531.224.206,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77	2.795.846.813,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77	2.795.846.813,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77	2.795.846.813,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	442.197.389.000,00	441.881.227.088,00	99,93	300.920.715.300,00
5.4.01.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	9.600.000.000,00	9.540.281.000,00	99,38	9.376.212.300,00
5.4.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.2	432.597.389.000,00	432.340.946.088,00	99,94	291.544.503.000,00
5.4.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Daearh Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer		442.197.389.000,00	441.881.227.088,00	99,93	300.920.715.300,00
	JUMLAH BELANJA		5.177.879.482.000,00	4.608.120.868.464,26	89,00	2.906.895.452.391,91

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2022	REALISASI 2022
1	2		3		5 = (4 / 3) * 100	6
	SURPLUS/DEFISIT	**5.1.3**	**(800.433.738.094,00)**	**92.783.306.910,52**	**(11,59)**	**262.501.394.943,99**
6	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**	**802.433.738.094,00**	**802.427.865.251,52**	**100,00**	**539.932.343.149,53**
6.1.01	Penggunaan SILPA	5.1.4.1	802.433.738.094,00	802.427.865.251,52	100,00	539.932.343.149,53
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**802.433.738.094,00**	**802.427.865.251,52**	**100,00**	**539.932.343.149,53**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO		**800.433.738.094,00**	**800.427.865.251,52**	**100,00**	**539.932.343.149,53**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**5.1.5**	**0,00**	**893.211.172.162,04**	**0,00**	**802.433.738.093,52**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tanjung Redeb, Maret 2024

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS